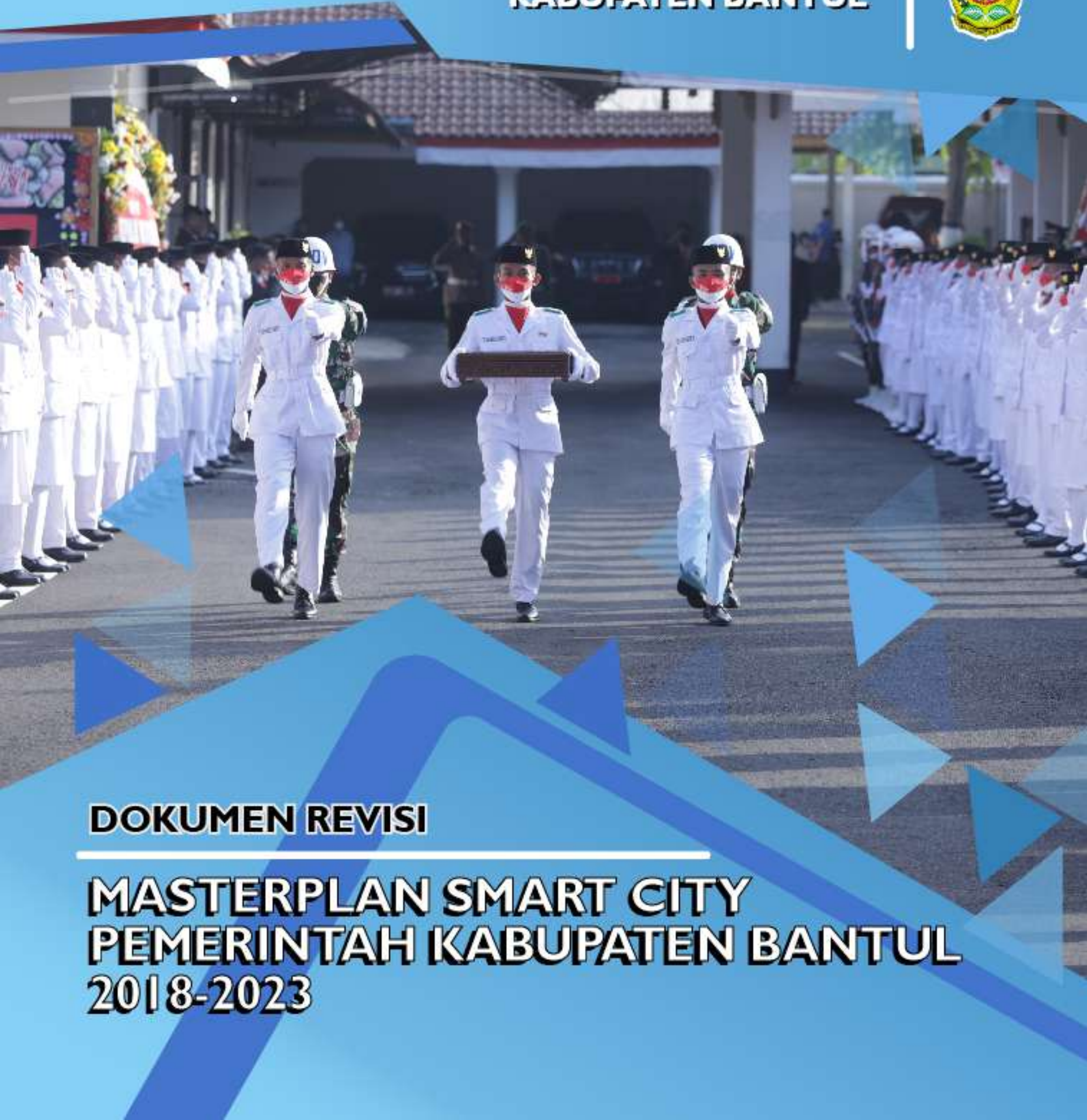


**PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL**



DOKUMEN REVISI

**MASTERPLAN SMART CITY
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
2018-2023**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
SAMBUTAN KEPALA DAERAH	iv
SAMBUTAN SEKRETARIS DEWAN <i>SMART CITY</i>	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Masterplan	6
1.3. Landasan Hukum	6
1.4. Kerangka Pikir <i>Smart City</i>	8
BAB II VISI MISI <i>SMART CITY</i>	30
2.1. Visi <i>Smart City</i> Kabupaten Bantul	30
2.2. Indikator Utama <i>Smart City</i> Kabupaten Bantul	32
BAB III STRATEGI PEMBANGUNAN <i>SMART CITY</i>	37
3.1. <i>Smart Governance</i>	37
3.2. <i>Smart Branding</i>	38
3.3. <i>Smart Economy</i>	39
3.4. <i>Smart Living</i>	40
3.5. <i>Smart Society</i>	40
3.6. <i>Smart Environment</i>	41
BAB IV RENCANA AKSI <i>SMART CITY</i>	43
4.1. Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan <i>Smart City</i>	43
4.2. Pengembangan Infrastruktur Pendukung <i>Smart City</i>	46
4.3. Pengembangan Perangkat Lunak <i>Smart City</i>	47
4.4. Penguatan Literasi <i>Smart City</i>	50
BAB V PETA JALAN PEMBANGUNAN <i>SMART CITY</i>	51
5.1. Peta Jalan <i>Smart City</i>	51
BAB VI BANTUL <i>SMART AREA</i>	59
BAB VII PENUTUP	68
REFERENSI	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pemetaan Sub-dimensi <i>Smart City</i>	21
Tabel 2. 1 Sinkronisasi Misi Pembangunan Dengan Misi <i>Smart City</i>	31
Tabel 2. 2 Dimensi, Sub-dimensi, Sasaran dan Indikator Utama	32
Tabel 3. 1 Strategi Sub-dimensi <i>Smart Governance</i>	37
Tabel 3. 2 Strategi Sub-dimensi <i>Smart Branding</i>	38
Tabel 3. 3 Strategi Sub-dimensi <i>Smart Economy</i>	39
Tabel 3. 4 Strategi Sub-dimensi <i>Smart Living</i>	40
Tabel 3. 5 Strategi Sub-dimensi <i>Smart Society</i>	41
Tabel 3. 6 Strategi Sub-dimensi <i>Smart Environment</i>	42
Tabel 6. 1 Hasil Pemetaan Beberapa Inovasi <i>Smart City</i>	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Salah Satu Contoh Implementasi <i>Smart City</i>	1
Gambar 1. 2 Revolusi Industri	2
Gambar 1. 3 Kegiatan Masyarakat Kabupaten Bantul dalam <i>Sunday Morning</i>	3
Gambar 1. 4 Konsep <i>Smart City</i>	5
Gambar 1. 5 Elemen Kesiapan Daerah Pintar (<i>Smart City Readiness</i>).....	9
Gambar 1. 6 Dimensi <i>Smart City</i>	9
Gambar 1. 7 <i>Smart Governance</i>	10
Gambar 1. 8 <i>Smart Branding</i>	12
Gambar 1. 9 <i>Smart Economy</i>	14
Gambar 1. 10 <i>Smart Living</i>	15
Gambar 1. 11 <i>Smart Society</i>	17
Gambar 1. 12 <i>Smart Environment</i>	18
Gambar 1. 13 Kerangka Pikir Masterplan <i>Smart City</i> Kabupaten Bantul	20
Gambar 1. 14 Konsep Pengembangan <i>Smart City</i> Kabupaten Bantul	29
Gambar 4. 1 Forum <i>Smart City</i>	46
Gambar 4. 2 Kerangka Arsitektur Perangkat Lunak <i>Smart City</i> Kab. Bantul	50
Gambar 6. 1 Peta Bantul <i>Smart Area</i>	61

SAMBUTAN KEPALA DAERAH

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.

Adanya perkembangan teknologi dan peningkatan literasi digital menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam digitalisasi pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang *smart*, efektif dan efisien. Salah satunya diwujudkan melalui konsep *Smart City*. Konsep *Smart City* mengarah pada peningkatan aksesibilitas pelayanan publik yang terintegrasi antar instansi pemerintahan.



Mewujudkan *Smart City* bukan hanya sekedar membangun teknologi, namun juga mewujudkan masyarakat yang cerdas dan bijaksana. Lebih jauh, untuk mewujudkan *Smart City* tentunya diperlukan pemerintahan yang *smart*. Bantul *Smart City* menjadi salah satu wujud keseriusan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam membangun *Smart City*. Program dan kegiatan enam dimensi *Smart City* telah diinisiasi dan diintegrasikan dengan berbagai program kegiatan pemerintahan daerah yang diharapkan dapat mendukung tercapainya visi dan misi *Smart City* Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dan sinergitas antar *stakeholder* dalam *Smart City*.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Bantul, Desember 2021
BUPATI BANTUL

H. ABDUL HALIM MUSLIH

SAMBUTAN SEKRETARIS DEWAN SMART CITY

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita semua.

Kabupaten Bantul menjadi muka atau wajah DIY bagian selatan. Sebagai kawasan pesisir, Kabupaten Bantul tentunya memiliki potensi sumber daya alam yang potensial. Berbagai potensi sumber daya perlu dioptimalkan dan dilestarikan secara *sustainable*. Oleh karena itu, diperlukan suatu konsep yang mampu mengelola daerah dengan cara inovatif dan cerdas dengan meminimalkan anggaran yang diperlukan dengan hasil yang optimal. Dewasa ini, konsep *Smart City* banyak diadopsi dan diterapkan di seluruh dunia, tidak terkecuali Kabupaten Bantul.

Rencana pengembangan *Smart City* Kabupaten Bantul yang diselaraskan dengan berbagai dokumen pembangunan, kemudian dirinci kedalam enam dimensi yaitu dimensi *smart governance*, *smart branding*, *smart economy*, *smart living*, *smart society* dan *smart environment*. Program *Smart City* Kabupaten Bantul perlu dilandasi dengan berbagai rencana aksi yang perlu dipersiapkan. Program dan rencana aksi yang dibuat dalam Masterplan ini disesuaikan dengan urgensi permasalahan dan kondisi Kabupaten Bantul. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Masterplan *Smart City* Kabupaten Bantul. Harapannya, Dokumen Masterplan *Smart City* dapat menjadi panduan dalam mewujudkan pembangunan dan pengembangan Kabupaten Bantul menjadi kabupaten cerdas.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Bantul, Desember 2021
**SEKRETARIS DEWAN
SMART CITY**

Ir. Fenty Yusdayati, M.T.

BAB 01

PENDAHULUAN

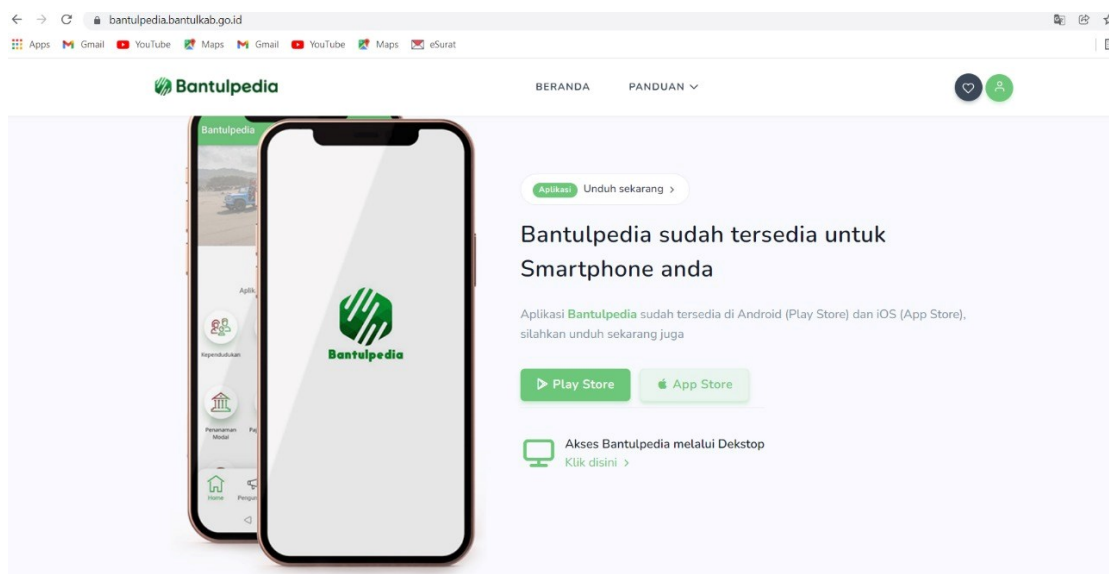


BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara umum, untuk disebut sebagai kota besar dan makmur, kota-kota di seluruh dunia memiliki standar dan kualitas yang baik di berbagai sektor kegiatan serta kehidupan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka sangat diperlukan kombinasi antara perencanaan kota, peningkatan kualitas tata pemerintahan, teknologi yang inovatif, masyarakat yang lebih sejahtera dan bisnis yang berkembang untuk menghasilkan apa yang dikenal sebagai *Smart City*.

Untuk mencapai predikat *Smart City* diperlukan pengembangan infrastruktur yang cerdas dan penggunaan teknologi informasi untuk mengumpulkan dan menganalisa data yang akan berguna bagi pemerintah, masyarakat dan pebisnis lokal.



**Gambar 1. 1 Salah Satu Contoh Implementasi *Smart City*
di Kabupaten Bantul**

Sumber: Bantulpedia, 2021

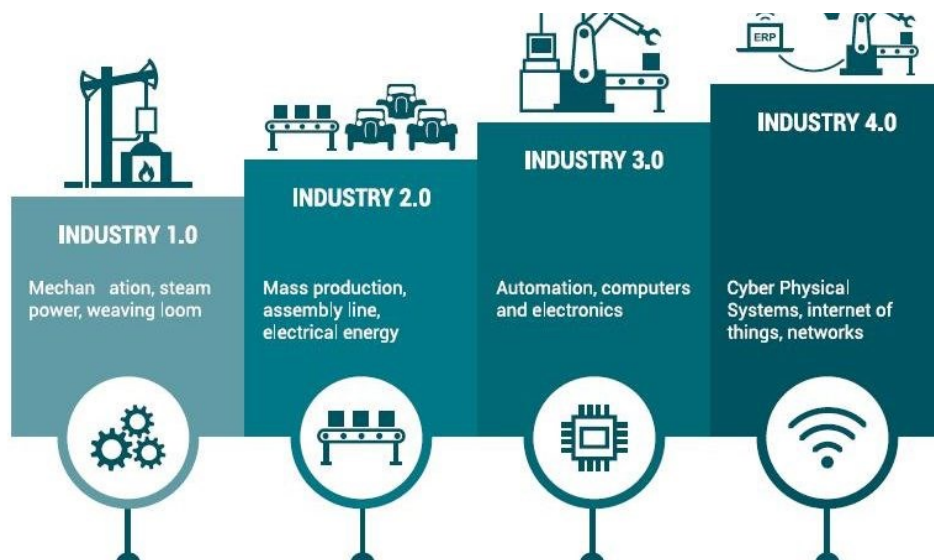
Menjadi *Smart City* juga berarti harus terus berinovasi dan berkembang dengan cara yang lebih baik. Selain investasi modal, diperlukan metode yang inovatif dan efisien dalam menemukan kebutuhan masyarakat yang tinggal, bekerja, atau bahkan hanya mengunjungi Kabupaten Bantul.

Dalam era teknologi seperti sekarang ini, diperlukan pendekatan baru dengan memanfaatkan teknologi informasi yang inovatif dan *smart* infrastruktur. Perlu

dipahami, apabila perubahan tersebut baik, maka perlu ditingkatkan standar dan kualitas daripada tetap mempertahankan pendekatan tradisional.

Tren persaingan dunia sudah bergeser dari sekedar membangun daya saing nasional atau negara menuju daya saing kota atau kabupaten. Kota Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Denpasar, Makassar dan lain-lain, bersaing dengan Kota Singapura, Kuala Lumpur, Johor Bahru, Osaka, Seoul, Tokyo, Mumbai dan lain-lain untuk menjadi pilihan masyarakat global dalam melakukan aktifitas investasi, perdagangan, wisata, kemitraan dan lain-lain. Pada saat yang sama masyarakat di suatu daerah berharap akan lingkungan tempat tinggal yang layak (*livable*) dan inovatif dan berkelanjutan (*sustainable*). Tuntutan sebuah kota atau lingkungan yang nyaman, aman, sehat, mudah, dan berkemakmuran menjadi indikator kota yang berdaya-saing.

Pada saat yang sama, tren revolusi digital secara drastis telah mengubah cara hidup dan bahkan masa depan peradaban umat manusia. Gerd Leonhard menggambarkan bahwa gerakan digitalisasi telah membawa perubahan yang bersifat tidak hanya eksponensial tetapi juga kombinatorial. Mengantarkan manusia ke era di mana perubahan yang terjadi pada peradaban manusia untuk 20 tahun ke depan akan mengalahkan perubahan yang pernah terjadi sejak tiga ratus tahun yang lalu.



Gambar 1. 2 Revolusi Industri
Sumber: Computers Tech News, 2022

Salah satu fenomena perubahan yang bisa kita amati adalah terjadinya akselerasi proses urbanisasi di seluruh dunia. Pada tahun 2014, sebuah studi oleh PBB tentang tren urbanisasi dunia menunjukkan bahwa untuk pertama kali dalam sejarah umat manusia, lebih dari setengah populasi manusia (54%) hidup di daerah *urban*.

Tren urbanisasi ini akan terus berlanjut dan diperkirakan pada tahun 2050 populasi *urban* akan mencapai angka 66% dari seluruh populasi dunia. Di Indonesia sendiri populasi *urban* telah mencapai 53.3% di tahun 2015 (BPS RI) dan berdasarkan penelitian oleh Citiasia Center for Smartnation (CCSN) jumlah ini akan meningkat menjadi 68% di tahun 2035.

Digitalisasi juga telah memperluas arti dari urbanisasi itu sendiri. Terminologi urbanisasi lahir pertamakali pada masa revolusi industri, ketika kehidupan berubah dari pola ekonomi pertanian ke pola ekonomi industri (manufaktur). Warga desa berbondong-bondong berpindah ke kota untuk mendapatkan pekerjaan sebagai pekerja di pabrik-pabrik sebagai kesempatan baru yang muncul terutama akibat ditemukannya konsep mesin uap, mekanisasi, dan elektrifikasi. Pada masa ini batas-batas dimensi fisik sangat jelas terlihat. Hal ini sangat kontras dengan apa yang terjadi pada masa kini, dalam dunia digital batas-batas dimensi fisik begitu samar atau bahkan pada kasus-kasus tertentu batas-batas dimensi fisik ini benar-benar tidak ada. Artinya urbanisasi tidak bisa lagi diejawantahkan sebagai migrasi fisik semata. Melainkan juga migrasi gaya hidup dan interaksi *socio-cultural* masyarakat dari pola-pola bersifat *rural* ke pola yang bersifat *urban*.



Gambar 1. 3 Kegiatan Masyarakat Kabupaten Bantul dalam *Sunday Morning Stadion Sultan Ageng Bantul*

Sumber: Dikpora Kabupaten Bantul, 2021

Masyarakat *urban* merupakan sebuah sistem kompleks di mana aktor-aktor penyusunnya yaitu manusia, teknologi, dan lingkungan saling terhubung dan mempengaruhi. Lahir dan berkembangnya pusat-pusat masyarakat yang bersifat *urban* akan selalu menghadirkan tantangan-tantangan baru seperti kemiskinan, kemacetan, kesenjangan sosial, kriminalitas, berkurangnya sumberdaya alam, polusi, masalah kesehatan dan tantangan-tantangan lainnya.

Untuk menyelesaikan tantangan dan persoalan perkotaan tersebut diperlukan strategi dan pendekatan yang komprehensif, inklusif, efektif dan efisien. Pembangunan berbasis *Smart City* telah menjadi tren pembangunan kota atau daerah di dunia dan menjadi keniscayaan yang harus diadaptasi daerah atau kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Pembangunan *Smart City* tidak sekedar mengedepankan efisiensi birokrasi dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) namun juga bagaimana membangun masyarakat dengan menjadikan infrastruktur dan sarana TIK sebagai faktor pendukung atau *enabler*.

Tren gerakan pembangunan kota atau daerah berbasis *Smart City* bisa kita saksikan di berbagai belahan dunia seperti Barcelona, Tokyo, London, Berlin, Amsterdam, Melbourne, Seoul, Shanghai, Mumbai, Singapura dan lain-lain. Di setiap kota di berbagai belahan dunia tersebut memiliki kisah sukses pembangunan *Smart City* yang berbeda-beda sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh setiap kota. Di Korea, sebuah kawasan reklamasi seluas 600 hektar dibangun dari nol sebagai sebuah *Smart City*, sedangkan di Dubai menjadikan Masdar sebagai Kota yang membangun program kemandirian energi dengan energi surya dan terbarukan serta bertekad menjadi kota yang bebas emisi karbon, Amsterdam fokus pada pembangunan *Smart People*, *Smart Energy*, dan *Smart Waste Management*. Di Singapura, pembangunan *Smart City* langsung dikendalikan dibawah Prime Minister Office sebagai sebuah program untuk warga, pebisnis, dan pemerintah untuk mendukung peningkatan kualitas hidup dengan memanfaatkan teknologi, ide, aplikasi, dan *big data*.

Namun perlu dipahami bahwa konsep *Smart City* adalah konsep yang unik dan dinamis. Inisiasi-inisiasi yang muncul sebagai solusi akan permasalahan kota yang satu tidak serta merta bisa diaplikasikan sebagai solusi akan permasalahan yang muncul di kota yang lain. Hal ini terjadi karena *Smart City* menekankan pentingnya sebuah inovasi untuk menyelesaikan persoalan masing-masing kota dengan memanfaatkan teknologi TIK, sensor, dan *data analytic* sebagai faktor pendukung untuk mempermudah penyelesaian masalah (*enabling factor*). Pembangunan berbasis *Smart City* menyediakan ruang inovasi yang luas untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh pemerintah daerah, masyarakat, pelaku bisnis, dunia pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) lain. Jadi inisiasi *Smart City* yang muncul bukanlah solusi mutlak yang menutup pintu inovasi dan pengembangan lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan adanya panduan agar pemerintah kabupaten dan kota mampu mempersiapkan dan mengimplementasikan konsep *Smart City* dengan baik sesuai dengan karakter dan potensi yang dimiliki.

Proses pembangunan *Smart City* merupakan usaha yang memerlukan waktu dan tidak seketika. Diperlukan komitmen dan perencanaan yang matang serta

menyeluruh. Pada tahap-tahap tertentu, usaha pembangunan *Smart City* juga perlu melibatkan semua pihak di tingkat daerah maupun di tingkat pusat, baik dari pihak warga, pemerintah maupun swasta. Selain untuk mewujudkan terciptanya sinkronisasi, hal ini juga dimaksudkan untuk menyamakan (*alignment*) pemahaman akan visi, misi, dan mempertemukan kepentingan yang berbeda dari setiap pihak serta menumbuhkan rasa kepemilikan (*sense of belonging*) atas rencana pembangunan *Smart City* yang diinisiasi. Dengan kata lain pembangunan *Smart City* merupakan usaha yang kontinu, bertahap, dan bersifat multi sektoral oleh karena itu, diperlukan sebuah perencanaan berjangka waktu dan terintegrasi yang dituangkan dalam bentuk dokumen masterplan *Smart City*.

Pada dasarnya konsep *Smart City* berfokus pada pengembangan elemen manusia melalui pemanfaatan teknologi. Jadi melalui teknologi setiap elemen didorong untuk berpikir kreatif dan aktif dalam melahirkan inovasi-inovasi demi mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, sehat, nyaman, dan aman. Masterplan *Smart City* hadir sebagai wadah berbagai inovasi yang muncul dari proses berpikir kreatif dan identifikasi aktif. Masterplan *Smart City* memungkinkan setiap ide dapat terakomodasi ataupun memperkaya ide yang lainnya. Masterplan *Smart City* juga memastikan bahwa suatu ide tidak akan berdiri sendiri melainkan akan menjadi bagian dari suatu rencana implementasi yang terintegrasi dan komprehensif.



Gambar 1. 4 Konsep *Smart City*

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2019

Masterplan *Smart City* berperan vital sebagai landasan materi dan panduan pembangunan konsep kota masa kini dan masa depan. Masterplan ini berperan besar dalam membantu pemerintah menetapkan kebijakan, regulasi, dan arah serta prioritas pembangunan kota. Sebagai perencanaan yang disusun secara khusus berdasarkan visi, identitas, dan karakter kota, Masterplan *Smart City* mempermudah pemerintah dalam mengurai masalah khas perkotaan. Masterplan *Smart City* juga memastikan transformasi memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Sesuai dengan karakter dan kebutuhan spesifik daerah;
2. Berpeluang untuk berhasil dilaksanakan yang maksimal;
3. Obyektif, tepat sasaran, dan tepat guna;
4. Berkesinambungan dalam menjaga keseimbangan kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan; dan
5. Dapat secara nyata diimplementasikan sesuai dengan kemampuan daerah.

1.2. Tujuan Masterplan

Adapun tujuan dari disusunnya Masterplan *Smart City* Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

1. Sebagai dasar, acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan *Smart City* di Kabupaten Bantul;
2. Sebagai alat pengendali terhadap seluruh kegiatan untuk mendukung *Smart City* Kabupaten Bantul;
3. Dasar yang dijadikan pedoman pemilihan keputusan dan penetapan kebijakan dalam pembangunan *Smart City* Kabupaten Bantul;
4. Menyelaraskan penerapan *Smart City* dengan *business process* pemerintah daerah;
5. Perangkat daerah dan instansi terkait dapat berakselerasi dalam percepatan transformasi birokrasi;
6. Menjamin terakomodasinya sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Bantul dalam dokumen perencanaan *Smart City* Bantul; dan
7. Mendorong proses pengembangan *Smart City* yang efektif, efisien, inklusif, dan partisipatif.

1.3. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
8. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*;
9. Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik;
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 93 Tahun 2020 Tentang Masterplan *Smart City* Kabupaten Bantul;
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 99 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika;
18. Keputusan Bupati Bantul Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Bantul *Smart City*;
19. Keputusan Bupati Bantul Nomor 410 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Dewan *Smart City* Kabupaten Bantul;
20. Keputusan Bupati Bantul Nomor 411 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Bantul *Smart City* Kabupaten Bantul; dan
21. Keputusan Bupati Bantul Nomor 250 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul.

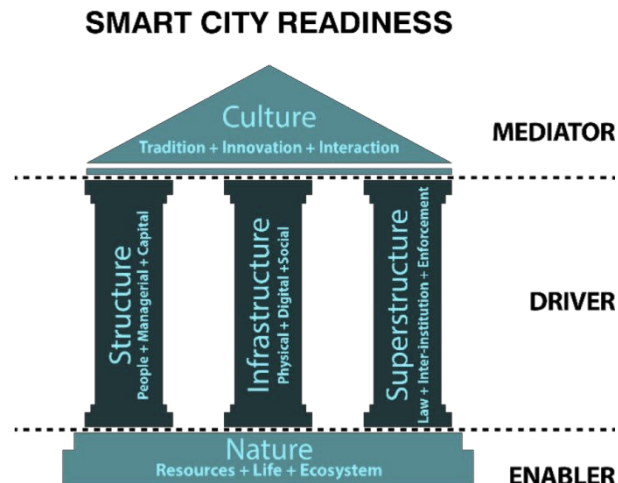
1.4. Kerangka Pikir *Smart City*

Kerangka pikir *Smart City* atau Daerah Pintar telah dikembangkan oleh banyak pakar dan akademisi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Beberapa lembaga seperti *Smart Cities Council*, CISCO, Uni Eropa, dan IEEE telah mengembangkan kerangka pikir terhadap pembangunan *Smart City*. Selain lembaga-lembaga tersebut terdapat kerangka pikir yang dikembangkan oleh lembaga *think tank* dalam negeri di mana kerangka pikir yang dikembangkan tersebut telah disesuaikan dengan konteks Indonesia.

Istilah *smart* dalam Bahasa Indonesia disebut dengan “pintar”, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “pandai; cakap”; “cerdik; banyak akal”; dan “mahir (melakukan atau mengerjakan sesuatu)” atau “cerdas” yang diartikan sebagai “sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya); tajam pikiran”; dan “sempurna pertumbuhan tubuhnya (sehat, kuat)”. Kata “Kota Pintar” dipilih untuk menunjukkan pengertian yang lebih luas dari kata cerdas atau “*intelligent*”. Namun demikian, penggunaan kata “Kota Cerdas” juga diperkenankan jika ada daerah yang memilih menggunakan istilah tersebut.

Dalam membangun *Smart City*, terlebih dahulu suatu kota/kabupaten harus memiliki Kesiapan Daerah Pintar atau *Smart City Readiness*. Terdapat beberapa elemen utama dalam kesiapan daerah pintar, yaitu *nature*, *structure*, *infrastructure*, *superstructure*, dan *culture*. Ilustrasi elemen kesiapan daerah pintar tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.5.

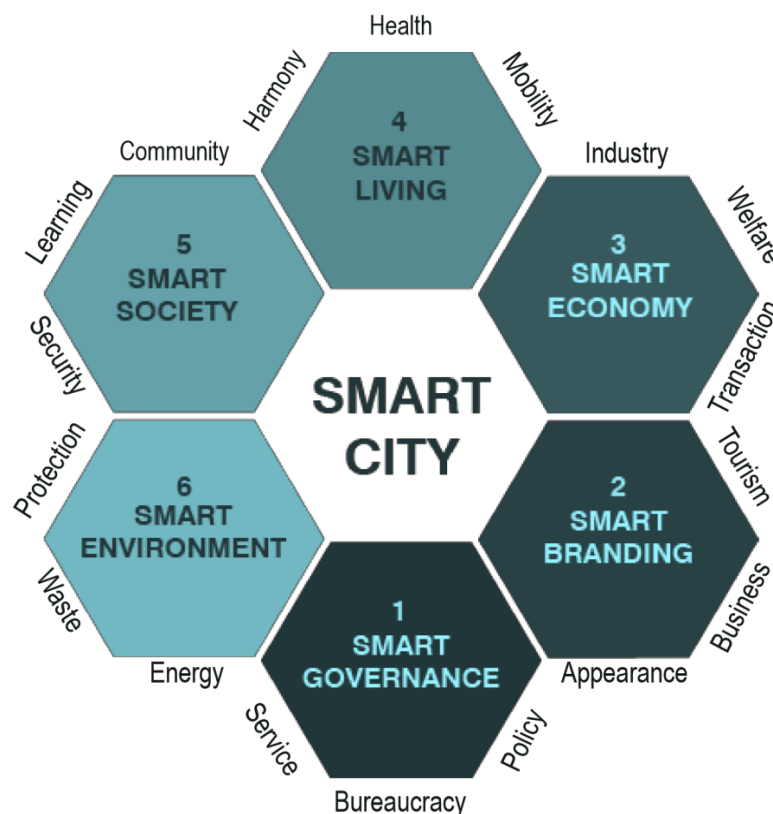
1. *Nature*: penyiapan sumber daya fisik lingkungan, ekosistem, serta potensi dan tantangan yang terdapat di wilayah;
2. *Structure*: pembangunan sumber daya manusia (SDM) pelaksana dan penerima manfaat *Smart City*, penyiapan sumber daya anggaran, dan sumber daya tata kelola dan tata pamong;
3. *Infrastructure*: pembangunan infrastruktur pendukung *Smart City* yang meliputi infrastruktur fisik, infrastruktur digital atau TIK, dan infrastruktur *social* untuk kepentingan umum;
4. *Superstructure*: penyiapan kebijakan atau peraturan daerah, kelembagaan, dan tata laksana pelaksanaan pembangunan *Smart City*; dan
5. *Culture*: penyiapan aspek-aspek nilai budaya, adat istiadat, kebiasaan, serta inovasi masyarakat sekitar.



Gambar 1. 5 Elemen Kesiapan Daerah Pintar (*Smart City Readiness*)

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2021

Analisis Kesiapan Daerah Pintar menjadi langkah awal untuk menganalisis kesenjangan kondisi target yang ingin dicapai dengan kondisi saat ini. Dalam implementasinya, konsep *Smart City* di Indonesia diturunkan dalam enam dimensi seperti terlihat pada Gambar 1.6.



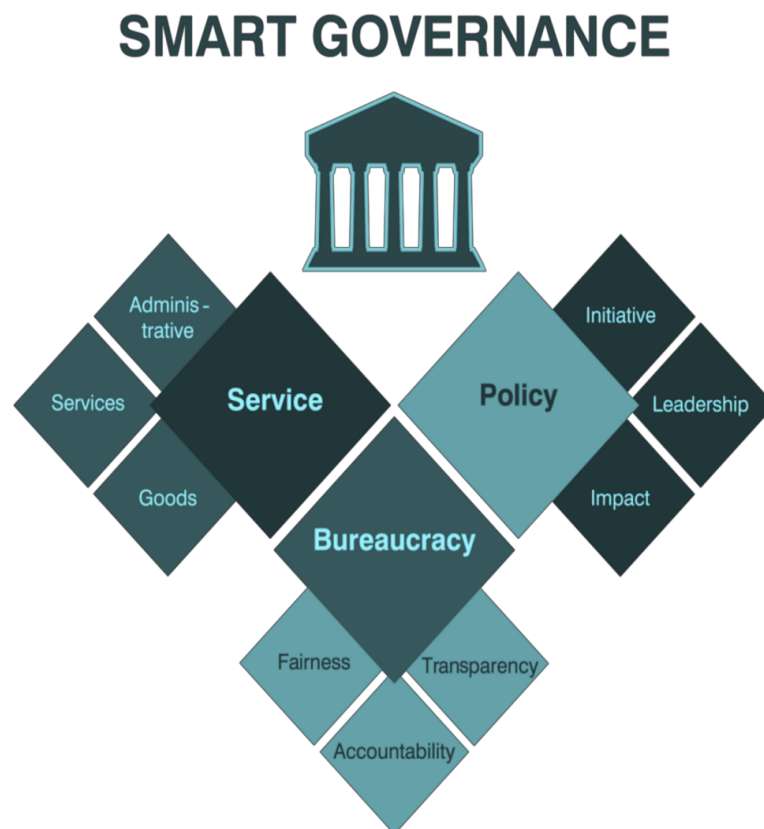
Gambar 1. 6 Dimensi *Smart City*

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2021

1. *Smart Governance*

Smart Governance dapat diartikan sebagai tata kelola kota yang pintar, di mana komponen tata kelola ini umumnya menyoroti tata kelola dari pemerintah Kabupaten Bantul sebagai institusi yang mengendalikan sendi-sendi kehidupan kota. *Smart Governance* dalam dimensi *Smart City* merupakan gambaran tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan secara pintar yang mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan *business process* yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif, dan selalu melakukan perbaikan.

Adapun sasaran dari *Smart Governance* adalah mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan Kabupaten Bantul yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.



Gambar 1. 7 *Smart Governance*

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2021

Tentu saja dalam melakukan perubahan pola-pola tradisional dalam tata kelola pemerintahan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, namun adopsi teknologi adalah hal yang akan memberikan percepatan terhadap perubahan

tersebut. Adapun tiga sub-dimensi dari *Smart Governance* dapat dirinci sebagai berikut:

a. Layanan publik (*service*)

- Pelayanan administrasi kepada masyarakat yang meliputi: status kewarganegaraan, status usaha, sertifikat kompetensi, kepemilikan, atau penguasaan atas barang. Wujud dari produk tersebut adalah dokumen-dokumen resmi seperti SIUP, ijin trayek, ijin usaha, akta, kartu tanda penduduk, sertifikat tanah, dan lain sebagainya.
- Peningkatan penyediaan sarana prasarana dan monitoring penyediaan kebutuhan bahan pokok untuk masyarakat misalnya: sembilan bahan pokok, air bersih, dan lain-lain.
- Peningkatan penyediaan sarana prasarana dan monitoring penyediaan kebutuhan jasa pokok bagi masyarakat misalnya: jaringan telepon, listrik, internet, dan lain-lain.

b. Birokrasi (*bureaucracy*)

- Tata kelola birokrasi yang berorientasi pada keadilan, bertanggungjawab dan keterbukaan. Misalnya: sistem *e-planning*, *e-budgeting*, *e-monev* dan lain-lain. Pengembangan aplikasi *e-gov* harus diarahkan menuju *integrated & inter-operability e-gov* atau yang saling berkomunikasi dan terhubung antar satu aplikasi dengan aplikasi lainnya serta lintas Perangkat Daerah atau yang disebut dengan *Smart e-Gov*. Pelayanan *Smart e-Gov* ini perlu didukung dengan sebuah "*City Operation Center (COC)*".

c. Perancangan kebijakan (*policy*)

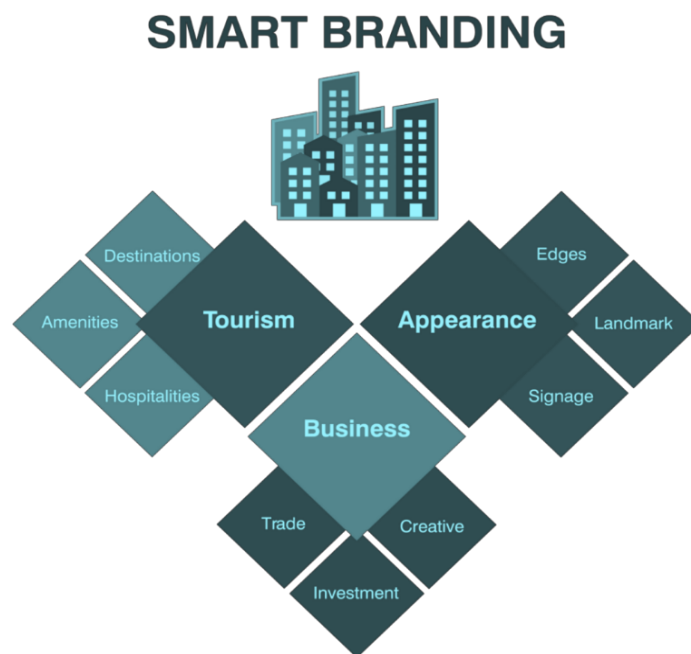
- Pengambilan kebijakan publik dengan mengutamakan pada aspek yang memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui mekanisme mendengarkan aspirasi masyarakat secara berkesinambungan.
- Sistem informasi kebijakan pemerintah yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah.

2. *Smart Branding*

Dimensi kedua dalam *Smart City* adalah *Smart Branding*, yaitu: inovasi dalam memasarkan Kabupaten Bantul sehingga mampu meningkatkan daya saing dengan mengembangkan tiga sub-dimensi, yaitu: pariwisata (*tourism*), daya saing bisnis (*business*), dan wajah tampilan kota (*appearance*). *Smart Branding* menjadi salah satu dimensi dalam *Smart City* karena dalam era informasi seperti saat ini, sebuah kota tidak lagi harus mampu memenuhi

kebutuhan-kebutuhannya dengan hanya memanfaatkan potensi lokalnya, tetapi harus juga mampu menarik partisipasi masyarakat, baik dari dalam maupun luar Kabupaten Bantul, serta pelaku bisnis dan investor untuk ikut mendorong percepatan pembangunan Kabupaten Bantul.

Konsep *branding Smart City* memiliki kemiripan dengan konsep *branding* dalam korporasi, hanya saja perbedaannya pada tujuannya. Tujuan *branding* korporasi adalah meningkatkan *brand value* perusahaan yang berujung pada meningkatnya *income* dan profit perusahaan, namun pada *branding Smart City*, tujuan yang ingin dicapai adalah peningkatan *brand value* yang akan mendorong aktivitas perekonomian dan pengembangan kehidupan sosial dan budaya lokal yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 1. 8 *Smart Branding*

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2021

Adapun tiga sub-dimensi dari *Smart Branding* dapat dirinci sebagai berikut:

a. Pariwisata (*tourism*)

- Membangun dan mengembangkan destinasi wisata yang layak bagi wisatawan (*destination*).
- Membangun infrastruktur yang mendukung kenyamanan wisatawan (*amenities*) misalnya jalan, transportasi, hotel, restoran, dan lain-lain.
- Membangun budaya yang ramah kepada pengunjung (*hospitality*) termasuk kemampuan berbahasa asing, ketersediaan *tour guide* dan lain-lain.

b. Daya saing bisnis (*business*)

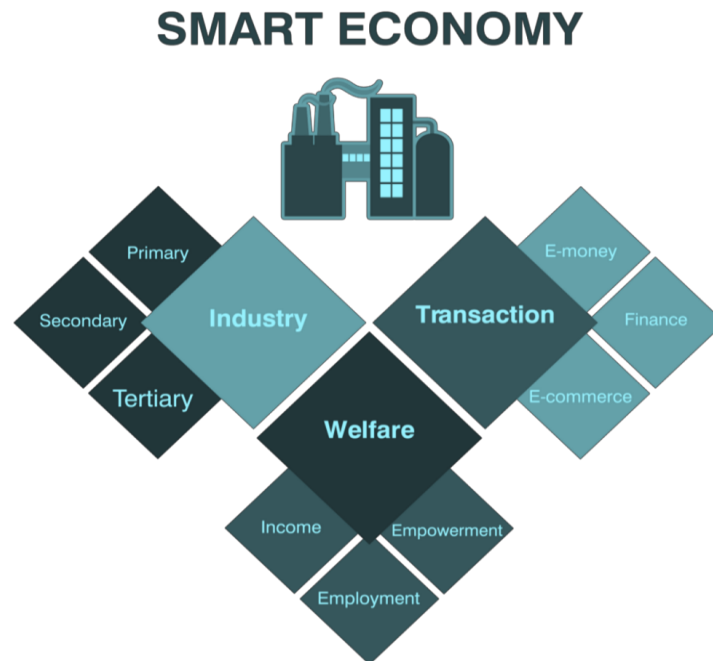
- Membangun *platform* dan memasarkan ekosistem perdagangan yang kondusif dan nyaman, misalnya: *marketplace* dan *e-commerce*.
- Membangun dan memasarkan ekosistem investasi yang mudah dan efektif, misalnya: *Investment Lounge*, *Dashboard*, dan Portal Investasi.
- Membangun dan memasarkan produk dan jasa industri kreatif, misalnya: kuliner, kriya, fashion, digital, dan lain-lain.

c. Wajah tampilan kota (*appearance*)

- Mewujudkan penataan kembali wajah kota yang menonjolkan nilai arsitektur yang mencerminkan nilai-nilai Kabupaten Bantul dan mengikuti dinamika modernisasi yang menginginkan sebuah tata ruang dan tata wilayah kota yang indah, bersih, rapi, dan membanggakan dengan kualitas arsitektur berkelas internasional.
- Membangun batas wilayah (*edge*), membangun penanda sebuah lokasi yang penting, berkesan bagi pengunjung (*landmark*), menyediakan navigasi yang unik menuju kota (*signage*), struktur jalan yang teratur (*path*), dan titik simpul kota (*node*), seperti: alun-alun, simpang tugu, dan lain-lain.

3. *Smart Economy*

Smart Economy atau tata kelola perekonomian pintar yang dimaksudkan untuk mewujudkan ekosistem perekonomian di Kabupaten Bantul yang mampu memenuhi tantangan di era informasi yang disruptif dan menuntut tingkat adaptasi yang cepat seperti saat ini.

**Gambar 1. 9 *Smart Economy***

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2021

Adapun sasaran dimensi *Smart Economy* adalah mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan Kabupaten Bantul yang adaptif terhadap perubahan yang terjadi di era informasi saat ini, serta meningkatkan *financial literacy* masyarakat melalui berbagai program diantaranya mewujudkan *less-cash society*. Adapun tiga sub-dimensi dari *Smart Economy* dapat dirinci sebagai berikut:

a. Ekosistem industri (*industry*)

- Membangun daya saing industri Kabupaten Bantul pada *leading sector* industri tertentu yang terintegrasi antara industri primer (misalnya: pertanian, perikanan, peternakan dan lain-lain), industri sekunder (misalnya: manufaktur, pengolahan, *packaging* dan lain-lain), dan industri tersier (misalnya: pasar produk Kabupaten Bantul).

b. Kesejahteraan masyarakat (*welfare*)

- Mengembangkan program peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan rumah tangga (*income*).
- Program peningkatan penyerapan angkatan kerja (*employment*).
- Program pemberdayaan ekonomi masyarakat (*empowerment*).

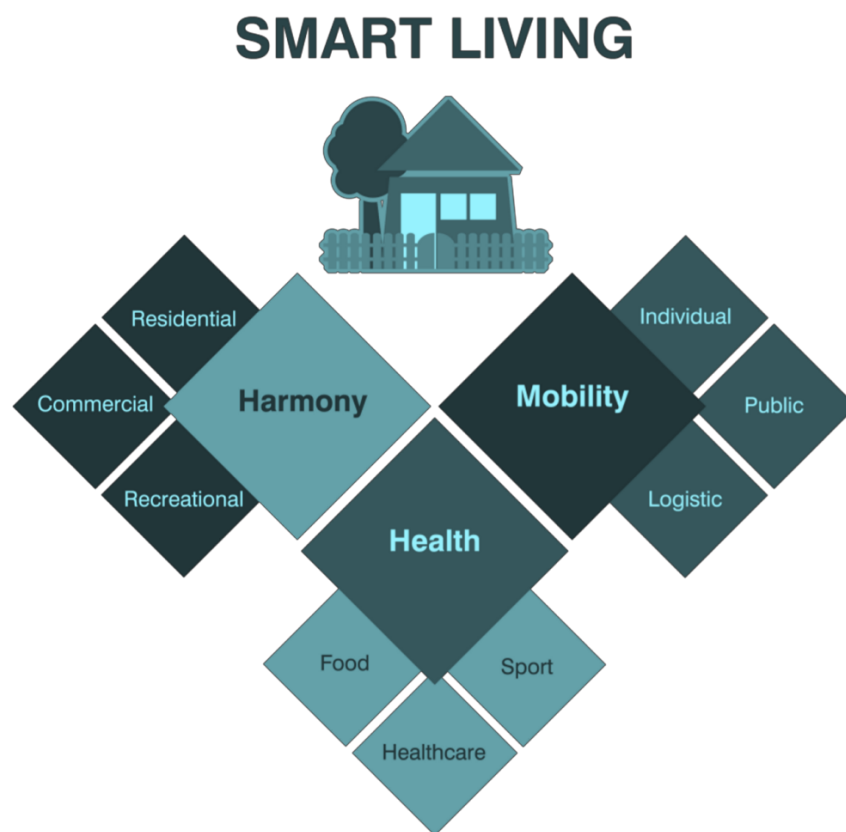
c. Ekosistem transaksi keuangan (*transaction*)

- Membangun ekosistem transaksi keuangan digital untuk menjamin kelancaran pembayaran menuju masyarakat yang *cash less*.

- Mewujudkan masyarakat yang *bankable* dan memiliki akses terhadap permodalan.
- Mewujudkan ekosistem ekonomi digital dengan mendorong industri *e-commerce* dan *marketplace*.

4. *Smart Living*

Smart Living bertujuan untuk menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat yang dinilai dari tiga sub-dimensi, yaitu harmonisasi tata ruang (*harmony*), kesehatan (*health*), dan transportasi (*mobility*). Adapun sasaran *Smart Living* adalah untuk mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman, dan efisien.



Gambar 1. 10 *Smart Living*

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2021

Adapun tiga sub-dimensi dari *Smart Living* dapat dirinci sebagai berikut:

a. Harmonisasi tata ruang (*harmony*)

- Mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman dan harmonis antara lingkungan pemukiman (*residential*), lingkungan pusat kegiatan bisnis (*commercial*) yang didukung dengan fasilitas rekreasi untuk keluarga (*recreational*).

b. Kesehatan (*health*)

- Mewujudkan akses terhadap ketersediaan makanan dan minuman sehat (*food*), akses terhadap pelayanan kesehatan yang (*healthcare*), dan akses terhadap sarana dan prasarana olahraga (*sport*).

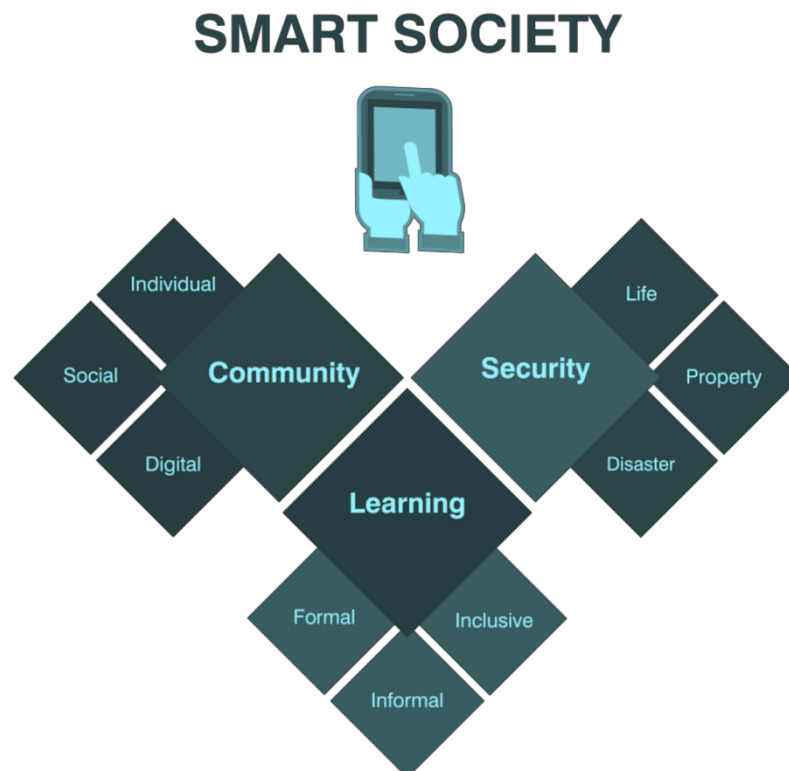
c. Transportasi (*mobility*)

- Mewujudkan ekosistem transportasi yang menjamin mudahnya mobilitas (*mobility*) bagi individual, publik, maupun untuk pemenuhan kebutuhan logistik Kabupaten Bantul.

5. *Smart Society*

Smart Society merupakan dimensi yang membahas tentang manusia sebagai unsur utama sebuah kota. Didalam *Smart Society*, interaksi antar manusia telah bergerak menuju ekosistem sosio-teknis di mana dimensi fisik dan *virtual* dari kehidupan warga kota semakin terjalin secara intensif. Interaksi antar-warga terjalin dengan semakin kuat dan tanpa sekat dengan mediasi teknologi.

Adapun sasaran *Smart Society* adalah mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun *virtual* untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan *digital literacy* yang tinggi. Sub-dimensi *Smart Society* terdiri dari interaksi masyarakat (*community*), ekosistem belajar/pendidikan (*learning*), dan keamanan masyarakat (*security*).

**Gambar 1. 11 *Smart Society***

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2021

Adapun tiga sub-dimensi dari *Smart Society* dapat dirinci sebagai berikut:

a. Interaksi masyarakat (*community*)

- Interaksi sosial masyarakat terjadi secara paralel antara individu dengan individu yang lain, individu dengan kelompok sosial, dan antar kelompok sosial, baik secara fisik maupun *virtual* (digital) dengan sasaran mewujudkan partisipasi publik dalam pembangunan Kabupaten Bantul. Berbagai program untuk mendukung kemajuan *Smart City*, misalnya: program pembinaan kepemudaan, peningkatan keahlian UKM, pemodalan, dan lain-lain.
- Pengembangan komunitas warga melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia baik secara individu, sosial mampu memanfaatkan lingkungan digital dengan positif dan produktif, misalnya: edukasi tentang *marketplace* dan *e-commerce*.

b. Ekosistem belajar/pendidikan (*learning*)

- Mewujudkan ekosistem pendidikan yang saling mendukung antara pendidikan formal dan non-formal untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan

akses terhadap pendidikan termasuk bagi masyarakat disabilitas dan lansia.

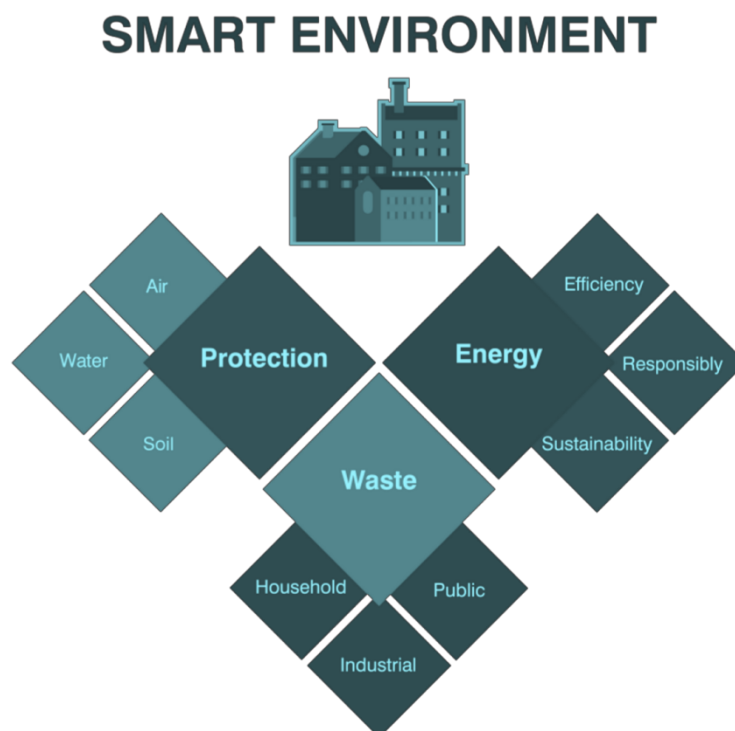
- Membangun *platform* edukasi bagi masyarakat, misalnya: *smart school*, *smart campus*, *learning management system*, dan lain-lain.

c. Keamanan masyarakat (*security*)

- Mewujudkan suatu sistem atau manajemen keamanan dan keselamatan bagi masyarakat baik perlindungan keselamatan jiwa, keselamatan properti, serta keselamatan atas risiko bencana bagi masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya dan alat kelengkapan pemerintah maupun teknologi sensorik atau *Internet of Thing (IoT)*.

6. *Smart Environment*

Dimensi *Smart Environment* adalah pengelolaan lingkungan yang pintar. Pintar tersebut diartikan sebagai perhatian bagi lingkungan hidup dalam pembangunan kota yang sama besarnya dengan perhatian yang diberikan terhadap pembangunan infrastruktur fisik maupun pembangunan sarana dan prasarana bagi warga. Ide dasar dari *Smart Environment* adalah mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.



Gambar 1. 12 *Smart Environment*

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2021

Adapun tiga sub-dimensi dari *Smart Environment* dapat dirinci sebagai berikut:

a. Proteksi lingkungan (*protection*)

- Mengembangkan sistem tata kelola perlindungan sumber daya tanah, air, dan udara serta mengintegrasikannya dengan teknologi *Internet of Thing (IoT)* guna mendapatkan data *real time*.
- Membangun ruang terbuka hijau.
- Melakukan restorasi sungai yang memiliki tingkat pencemaran tinggi.
- Mengendalikan pencemaran udara.

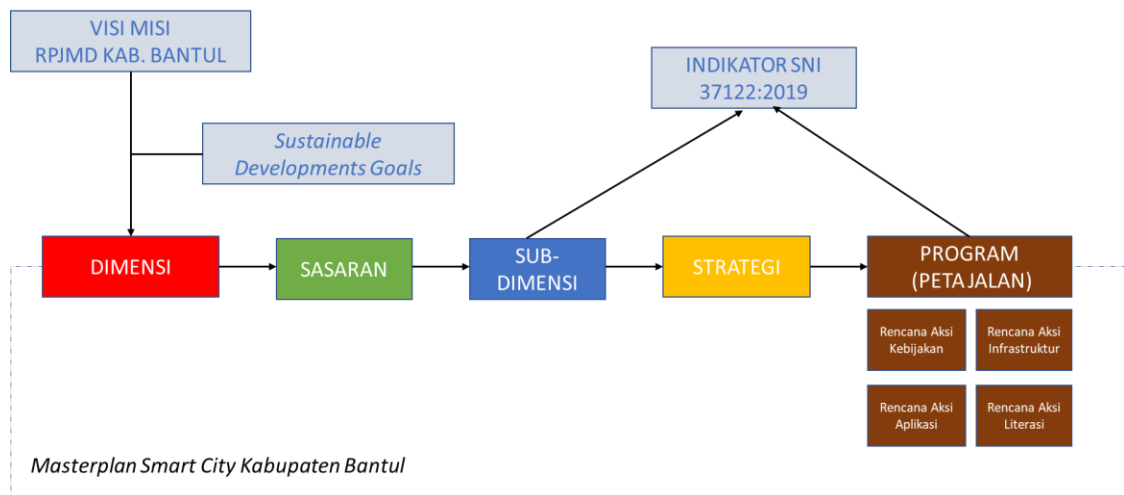
b. Pengelolaan sampah dan limbah (*waste*)

- Mengembangkan sistem tata kelola limbah atau sampah rumah tangga (*household*).
- Mengembangkan sistem tata kelola limbah industri (*industrial*).
- Menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan agar tidak mengganggu pemandangan, tidak merusak indra penciuman, dan menghindari banjir akibat genangan sampah yang menyumbat saluran air pembuangan limbah atau sirkulasi air residensial serta ketersediaan sistem sanitasi rumah tangga, industri dan publik yang baik dan bertanggung-jawab.

c. Tata kelola energi (*energy*)

- Pemanfaatan energi yang efisien dan bertanggung jawab.
- Pengembangan energi alternatif yang ramah lingkungan (*environmentally friendly*) dan berkelanjutan (*sustainable*) serta terjangkau bagi masyarakat. Misalnya: pemanfaatan limbah/sampah sebagai biogas, energi surya, tenaga angin, biomassa (tumbuhan dan hewan) dan lain-lain.

Masterplan *Smart City* Kabupaten Bantul ini disusun berdasarkan kondisi, potensi, dan karakteristik wilayah yang diselaraskan dengan berbagai dokumen pembangunan seperti Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Renstra Perangkat Daerah, serta berbagai dokumen pendukung lainnya. Lebih jauh, Masterplan *Smart City* Kabupaten Bantul disusun dengan memperhatikan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* dan SNI ISO 37122:2019.



Gambar 1. 13 Kerangka Pikir Masterplan *Smart City* Kabupaten Bantul
Sumber: Hasil analisis, 2021

Visi dan misi Masterplan *Smart City* Kabupaten Bantul disusun berdasarkan pada visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Mengacu pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs dalam pelaksanaan *Smart City* daerah, visi dan misi pembangunan Kabupaten Bantul kemudian di *break down* berdasarkan pada dimensi beserta sub-dimensi *Smart City*, yaitu: Dimensi *Smart Governance* dengan sub-dimensi: layanan publik (*services*), birokrasi (*bureaucracy*), dan perancangan kebijakan (*policy*), Dimensi *Smart Branding* dengan sub-dimensi: pariwisata (*tourism*), daya saing bisnis (*business*), dan wajah tampilan kota (*appearance*), Dimensi *Smart Economy* dengan sub-dimensi: ekosistem industri (*industry*), kesejahteraan masyarakat (*welfare*), dan ekosistem transaksi keuangan (*transaction*), Dimensi *Smart Living* dengan sub-dimensi: harmonisasi tata ruang (*harmony*), kesehatan (*health*), dan transportasi (*mobility*), Dimensi *Smart Society* dengan sub-dimensi: interaksi masyarakat (*community*), ekosistem belajar/pendidikan (*learning*), dan keamanan masyarakat (*security*), dan Dimensi *Smart Environment* dengan sub-dimensi: proteksi lingkungan (*protection*), pengelolaan sampah dan limbah (*waste*), dan tata kelola energi (*energy*). Masing-masing sub-dimensi kemudian dianalisis berdasarkan indikator SNI 37122:2019 tentang Indikator untuk Kota Cerdas. Adapun pemetaan sub-dimensi *Smart City* terhadap SNI ISO 37122:2019 terdapat pada Tabel 1.1.

Tabel 1. 1 Pemetaan Sub-dimensi *Smart City* terhadap SNI ISO 37122:2019

Dimensi dan Sub-dimensi	Kelompok SNI
	Indikator SNI
Dimensi <i>Smart Governance</i>	
Sub-dimensi Layanan publik (<i>service</i>)	SNI Pemerintahan
	1. Jumlah kunjungan daring tahunan ke portal data terbuka kota per 100.000 penduduk.
	2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring.
	3. Rata-rata waktu respons terhadap pertanyaan yang dilakukan melalui sistem penyelidikan non-darurat kota (hari).
	SNI Telekomunikasi
	4. Persentase populasi kota dengan akses ke pita lebar (<i>broadband</i>) berkecepatan memadai.
	5. Persentase area kota di bawah zona putih / titik mati / tidak tercakup oleh konektivitas telekomunikasi.
	6. Persentase area kota yang dicakup oleh konektivitas Internet yang disediakan oleh kota.
	7. Rata-rata waktu henti (<i>downtime</i>) infrastruktur Teknologi Informasi (TI) kota.
	SNI Ekonomi
	8. Persentase kontrak layanan yang menyediakan layanan kota yang memuat kebijakan data terbuka.
Sub-dimensi Birokrasi (<i>bureaucracy</i>)	SNI Perencanaan Kota
	9. Jumlah warga kota per 100.000 penduduk per tahun yang terlibat dalam proses perencanaan.
	10. Persentase izin bangunan yang diajukan melalui sistem pengiriman elektronik.
	11. Waktu rata-rata untuk persetujuan izin bangunan (hari).
	12. Persentase populasi kota yang hidup dalam kepadatan populasi sedang hingga tinggi.

Dimensi dan Sub-dimensi	Kelompok SNI
	Indikator SNI
Sub-dimensi Perancangan kebijakan (<i>policy</i>)	-
Dimensi <i>Smart Branding</i>	
Sub-dimensi Pariwisata (<i>tourism</i>)	SNI Rekreasi
	1. Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring.
	SNI Budaya
	2. Jumlah pemesanan daring untuk fasilitas budaya per 100.000 penduduk.
	3. Persentase catatan budaya kota yang telah didigitalkan.
Sub-dimensi Daya saing bisnis (<i>business</i>)	-
Sub-dimensi Wajah tampilan kota (<i>appearance</i>)	-
Dimensi <i>Smart Economy</i>	
Sub-dimensi Ekosistem industri (<i>industry</i>)	SNI Pertanian perkotaan / lokal dan ketangguhan pangan
	1. Persentase tahunan dari anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian perkotaan.
	2. Total limbah makanan kota yang dikumpulkan tahunan dikirim ke fasilitas pemrosesan untuk pengomposan per kapita (dalam ton).
Sub-dimensi Kesejahteraan masyarakat (<i>welfare</i>)	3. Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk.
	4. Persentase tenaga kerja yang bekerja di Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
	5. Persentase angkatan kerja yang bekerja di sektor pendidikan, penelitian dan pengembangan.

Dimensi dan Sub-dimensi	Kelompok SNI
	Indikator SNI
Sub-dimensi Ekosistem transaksi keuangan (<i>transaction</i>)	SNI Keuangan
	6. Jumlah pendapatan tahunan yang dikumpulkan dari ekonomi berbagi sebagai persentase dari pendapatan sumber sendiri.
	7. Persentase pembayaran ke kota yang dibayar secara elektronik berdasarkan faktur elektronik.
Dimensi <i>Smart Living</i>	
Sub-dimensi Harmonisasi tata ruang (<i>harmony</i>)	SNI Perumahan
	1. Persentase rumah tangga dengan pengukur energi pintar.
	2. Persentase rumah tangga dengan pengukur air pintar.
Sub-dimensi Kesehatan (<i>health</i>)	SNI Kesehatan
	3. Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan.
	4. Jumlah janji temu medis tahunan yang dilakukan melalui jarak jauh per 100.000 penduduk.
Sub-dimensi Transportasi (<i>mobility</i>)	5. Persentase populasi kota yang memiliki akses ke sistem peringatan publik langsung (<i>real time</i>) untuk saran kualitas udara dan air.
	SNI Transportasi
	6. Persentase jalan umum dan jalan berbayar yang dicakup oleh peringatan dan informasi lalu lintas daring langsung (<i>real time</i>).
	7. Jumlah pengguna transportasi ekonomi berbagi per 100.000 penduduk.
	8. Persentase kendaraan yang terdaftar di kota yang merupakan kendaraan rendah emisi.
	9. Jumlah sepeda yang tersedia melalui layanan berbagi sepeda yang disediakan oleh kota per 100.000 penduduk.

Dimensi dan Sub-dimensi	Kelompok SNI
	Indikator SNI
	10. Persentase jalur transportasi umum yang dilengkapi dengan sistem langsung (<i>real time</i>) yang dapat diakses publik.
	11. Persentase layanan transportasi umum kota yang dicakup oleh sistem pembayaran terpadu.
	12. Persentase ruang parkir umum yang dilengkapi dengan sistem pembayaran elektronik.
	13. Persentase ruang parkir umum yang dilengkapi dengan sistem ketersediaan parkir langsung (<i>realtime</i>).
	14. Persentase lampu lalu lintas yang cerdas.
	15. Area kota dipetakan oleh peta jalan interaktif langsung (<i>real time</i>) sebagai persentase dari total luas kota.
	16. Persentase kendaraan yang terdaftar di kota yang merupakan kendaraan otonom (<i>autonomous</i>).
	17. Persentase rute angkutan umum dengan konektivitas internet yang disediakan kota dan/atau dikelola untuk komuter.
	18. Persentase jalan yang sesuai dengan sistem mengemudi otonom.
	19. Persentase armada bus kota yang digerakkan dengan motor.
Dimensi <i>Smart Society</i>	
Sub-dimensi Interaksi Masyarakat (<i>community</i>)	SNI Populasi dan kondisi sosial
	1. Persentase bangunan publik yang dapat diakses oleh orang-orang dengan kebutuhan khusus.
	2. Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan alat bantu mobilitas, perangkat, dan teknologi pendampingan bagi warga negara dengan kebutuhan khusus.
	3. Persentase penyeberangan pejalan kaki yang ditandai dilengkapi dengan sinyal pejalan kaki yang dapat diakses.

Dimensi dan Sub-dimensi	Kelompok SNI
	Indikator SNI
	4. Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan program yang ditujukan untuk menjembatani kesenjangan digital.
Sub-dimensi Ekosistem belajar/ pendidikan (<i>learning</i>)	SNI Pendidikan
	5. Persentase populasi kota dengan kecakapan profesional di lebih dari satu bahasa.
	6. Jumlah komputer, laptop, tablet atau perangkat pembelajaran digital lainnya yang tersedia per 1.000 siswa.
	7. Jumlah tingkat pendidikan tinggi Sains, Teknologi, Teknik Dan Matematika (STEM) per 100.000 penduduk.
	SNI Olahraga
	8. Jumlah buku perpustakaan umum dan judul <i>e-book</i> per 100.000 penduduk.
	9. Persentase populasi kota yang merupakan pengguna perpustakaan umum yang aktif.
Sub-dimensi Keamanan masyarakat (<i>security</i>)	SNI Keamanan
	10. Persentase area kota yang dicakup oleh kamera pengintai digital.
Dimensi <i>Smart Environment</i>	
Sub-dimensi Proteksi lingkungan (<i>protection</i>)	SNI Air Limbah
	1. Persentase air limbah olahan yang digunakan kembali.
	2. Persentase biosolids yang digunakan kembali (massa bahan kering).
	3. Energi yang berasal dari air limbah sebagai persentase dari total konsumsi energi kota.
	4. Persentase jumlah total air limbah di perkotaan yang digunakan untuk menghasilkan energi.
	5. Persentase jaringan pipa air limbah yang dimonitor oleh sistem sensor data <i>tracking real time</i> .

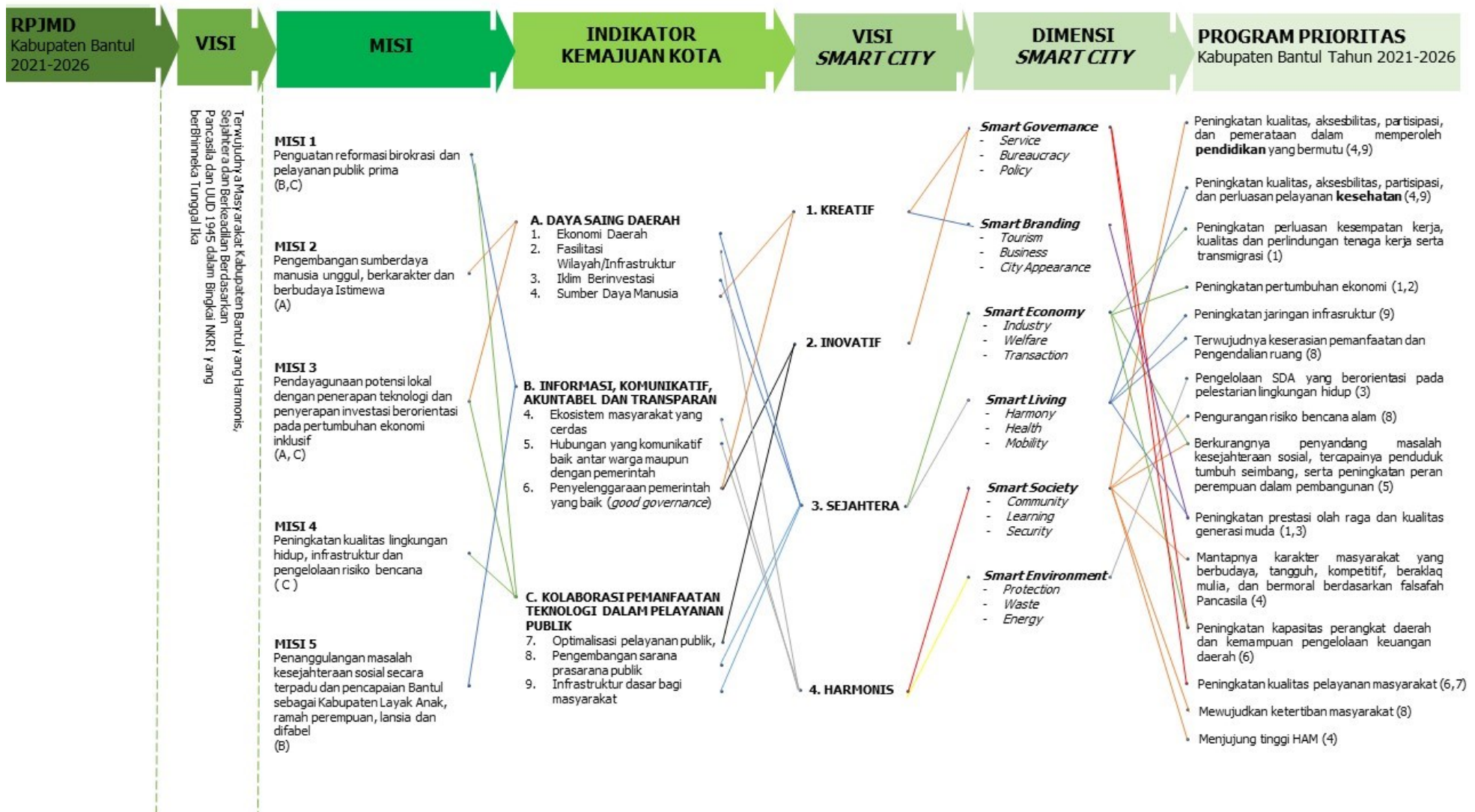
Dimensi dan Sub-dimensi	Kelompok SNI
	Indikator SNI
	SNI Air
	6. Persentase air minum yang dilacak oleh stasiun pemantauan kualitas air langsung (<i>real time</i>).
	7. Jumlah stasiun pemantauan kualitas air lingkungan langsung (<i>real time</i>) per 100.000 populasi.
	8. Persentase jaringan distribusi air kota yang dipantau oleh air cerdas sistem.
	9. Persentase bangunan di perkotaan dengan meteran air cerdas.
Sub-dimensi Pengelolaan sampah dan limbah (<i>waste</i>)	SNI limbah padat
	10. Persentase pusat pembuangan limbah (kontainer) yang dilengkapi dengan <i>telemetering</i> .
	11. Persentase populasi kota yang memiliki pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan pemantauan individu terhadap jumlah sampah rumah tangga.
	12. Persentase jumlah total sampah di kota yang digunakan untuk menghasilkan energi.
	13. Persentase dari jumlah total sampah plastik yang didaur ulang di kota.
	14. Persentase tempat sampah umum yang difungsikan dengan sensor.
	15. Persentase limbah listrik dan elektronik kota yang didaur ulang.
	SNI lingkungan dan perubahan iklim
	16. Persentase bangunan yang dibangun atau diperbaharui dalam 5 tahun terakhir sesuai dengan prinsip-prinsip bangunan hijau.
	17. Jumlah stasiun pemantauan kualitas udara jarak jauh secara langsung (<i>real time</i>) per kilometer persegi (km ²).
	18. Persentase bangunan umum yang dilengkapi untuk memantau kualitas udara dalam ruangan.

Dimensi dan Sub-dimensi	Kelompok SNI
	Indikator SNI
Sub-dimensi Tata kelola energi (<i>energy</i>)	SNI energi
	19. Persentase energi listrik dan energi termal yang dihasilkan dari pengolahan air limbah, limbah padat dan pengolahan limbah cair lainnya serta sumber daya limbah panas lainnya, sebagai bagian dari total bauran energi kota untuk tahun tertentu.
	20. Energi listrik dan termal (GJ) yang dihasilkan dari pengolahan air limbah per kapita per tahun.
	21. Energi listrik dan panas (GJ) dihasilkan dari limbah padat atau pengolahan limbah cair per kapita per tahun.
	22. Persentase listrik kota yang diproduksi menggunakan sistem produksi listrik desentralisasi.
	23. Kapasitas penyimpanan jaringan energi kota per total konsumsi energi kota.
	24. Persentase penerangan jalan yang dikelola oleh sistem manajemen kinerja cahaya/lampu.
	25. Persentase penerangan jalan yang telah dipugar dan yang baru dipasang.
	26. Persentase bangunan umum yang membutuhkan renovasi/perbaikan.
	27. Persentase bangunan di kota dengan pengukur energi cerdas.
	28. Jumlah stasiun pengisian kendaraan listrik per kendaraan listrik terdaftar.

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2021

Konsep *Smart City* menjadi salah satu *tool* dalam mengakselerasi dan mencapai implementasi program prioritas pembangunan Bupati Bantul. Oleh karena itu, konsep pengembangan *Smart City* Kabupaten Bantul perlu disinkronkan berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Berdasarkan Gambar 1.14. visi dan misi Bupati Bantul disinkronkan dengan Indikator Kemajuan Kota, visi *Smart City*, Dimensi *Smart City* dan program prioritas Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Adanya sinkronisasi program *Smart City* dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Bantul menunjukkan bahwa program *Smart City* Kabupaten Bantul selaras dan mendukung pencapaian target pada RPJMD. Lebih lanjut, indikator kemajuan Kota diidentifikasi berdasarkan analisis visi dan misi *Smart City* dalam mewujudkan visi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.



Gambar 1. 14 Konsep Pengembangan *Smart City* Kabupaten Bantul
Sumber: Hasil analisis, 2021



BAB 02

VISI MISI

SMART CITY

MASTERPLAN SMART CITY KABUPATEN BANTUL

BAB II

VISI MISI *SMART CITY*

2.1. *Visi Smart City Kabupaten Bantul*

Visi dan misi *Smart City* Kabupaten Bantul disusun dan diselaraskan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Bantul yang tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 dan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Adapun visi *Smart City* Kabupaten Bantul sebagai berikut:

“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang **Kreatif, Inovatif, Sejahtera,**
dan **Harmonis**”

Penjabaran dari visi *Smart City* Kabupaten Bantul, antara lain:

Kreatif: Mencari pemecahan sebuah kondisi ataupun permasalahan di Kabupaten Bantul secara cerdas, dalam arti berbeda (*out of the box*), serta membawa hasil yang tepat dan bermanfaat.

Inovatif: Mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan entitas yang mengelilinginya dalam menghasilkan transformasi digital pada layanan untuk masyarakat Bantul.

Sejahtera: Menggerakkan roda perekonomian Bantul dengan serangkaian program yang menyasar pada *entrepreneurship* untuk mencapai masyarakat Bantul yang makmur, dalam keadaan sehat, dan damai,

Harmonis: Hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para *stakeholder*, untuk menghasilkan layanan *Smart City* yang bermanfaat dan berkualitas, serta terwujudnya keamanan dan ketentraman masyarakat.

Berdasarkan visi *Smart City* Kabupaten Bantul selanjutnya diturunkan kedalam lima misi. Adapun misi *Smart City* Kabupaten Bantul, yaitu:

1. Reformasi birokrasi pemerintahan dengan transformasi digital layanan internal dan eksternal;

2. Peningkatan kompetensi guna menghasilkan SDM yang kreatif dan inovatif;
3. Peningkatan potensi lokal dengan digitalisasi dan *branding* untuk meningkatkan minat investasi yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif;
4. Mewujudkan ekosistem perkotaan yang maju dengan sarana dan prasarana publik yang berkualitas dan saling terintegrasi; dan
5. Pemanfaatan teknologi dalam mewujudkan Bantul yang ramah lingkungan, bersih, tangguh, dan berkelanjutan.

Penyelarasan misi dalam *Smart City* Kabupaten Bantul terhadap indikator *Smart City* menjadi penting dilakukan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di setiap dimensi sudah terwadahi dalam visi dan misi *Smart City*. Dengan adanya sinkronisasi misi Pembangunan Kabupaten Bantul dengan misi *Smart City* memberikan gambaran arah pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Bantul.

Tabel 2. 1 Sinkronisasi Misi Pembangunan Dengan Misi *Smart City* Kabupaten Bantul

Misi Pembangunan	Misi <i>Smart City</i>	Dimensi <i>Smart City</i>
MISI 1 Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.	MISI 1 Reformasi birokrasi pemerintahan dengan transformasi digital layanan internal dan eksternal.	<i>Smart Governance</i>
MISI 2 Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.	MISI 2 Peningkatan kompetensi guna menghasilkan SDM yang kreatif dan inovatif.	<i>Smart Society</i>
MISI 3 Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.	MISI 3 Peningkatan potensi lokal dengan digitalisasi dan <i>branding</i> untuk meningkatkan minat investasi yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.	<i>Smart Economy dan Smart Branding</i>

Misi Pembangunan	Misi <i>Smart City</i>	Dimensi <i>Smart City</i>
MISI 4 Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana.	MISI 5 Pemanfaatan teknologi dalam mewujudkan Bantul yang ramah lingkungan, bersih, tangguh, dan berkelanjutan.	<i>Smart Environment</i>
MISI 5 Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan, lansia dan difabel.	MISI 4 Mewujudkan ekosistem perkotaan yang maju dengan sarana dan prasarana publik yang berkualitas dan saling terintegrasi.	<i>Smart Living</i>

Sumber: Hasil analisis, 2021

2.2. Indikator *Utama Smart City* Kabupaten Bantul

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Sasaran *Smart City* dirumuskan berdasarkan visi dan misi *Smart City* yang akan dicapai. Adapun sasaran *Smart City* Kabupaten Bantul untuk setiap dimensi dan sub-dimensi antara lain sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Dimensi, Sub-dimensi, Sasaran dan Indikator Utama

DIMENSI	SUB-DIMENSI	SASARAN	INDIKATOR UTAMA
<i>Smart Governance</i>	Layanan publik (<i>service</i>)	Mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien yang didukung oleh sumber daya manusia dan Teknologi Informasi (IT) yang memadai.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
	Birokrasi (<i>bureaucracy</i>)	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi.

DIMENSI	SUB-DIMENSI	SASARAN	INDIKATOR UTAMA
		Kabupaten Bantul yang berkualitas.	
	Perancangan kebijakan (<i>policy</i>)	Optimalisasi kebijakan Kabupaten Bantul.	Persentase implementasi kebijakan Kabupaten Bantul.
<i>Smart Branding</i>	Pariwisata (<i>tourism</i>)	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul.	Cakupan peningkatan destinasi pariwisata.
	Daya saing bisnis (<i>business</i>)	Peningkatan daya saing Kabupaten Bantul yang bertumpu pada potensi unggulan yang dimiliki.	Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.
	Wajah tampilan kota (<i>appearance</i>)	Mewujudkan Kabupaten Bantul menjadi muka atau wajah DIY.	Jumlah kunjungan wisatawan.
<i>Smart Economy</i>	Ekosistem industri (<i>industry</i>)	Mewujudkan ekosistem yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan Kabupaten Bantul.	Laju pertumbuhan ekonomi.
		Terwujudnya pemerataan pendapatan di Kabupaten Bantul.	Rasio gini.

DIMENSI	SUB-DIMENSI	SASARAN	INDIKATOR UTAMA
		Terciptanya industri kreatif yang berkualitas.	Capaian jaringan kabupaten kreatif.
	Kesejahteraan masyarakat (<i>welfare</i>)	Turunnya jumlah masyarakat kurang mampu.	Tingkat kemiskinan.
	Ekosistem transaksi keuangan (<i>transaction</i>)	Terciptanya pengelolaan keuangan yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.	Opini BPK terhadap laporan keuangan.
<i>Smart Living</i>	Harmonisasi tata ruang (<i>harmony</i>)	Mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak dan berkelanjutan.	Indeks pembangunan infrastruktur
		Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang.	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang.
	Kesehatan (<i>health</i>)	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi.	Usia Harapan Hidup.
	Transportasi (<i>mobility</i>)	Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat yang berkualitas.	Indeks kualitas infrastruktur.

DIMENSI	SUB-DIMENSI	SASARAN	INDIKATOR UTAMA
<i>Smart Society</i>	Interaksi masyarakat (<i>community</i>)	Mewujudkan lingkungan masyarakat yang humanis dan dinamis, agar terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, interaktif dan tanggap teknologi informasi.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
	Ekosistem belajar/ pendidikan (<i>learning</i>)	Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan.	Angka Harapan Lama Sekolah.
	Keamanan masyarakat (<i>security</i>)	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat.	Persentase penanganan gangguan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
		Terwujudnya penurunan risiko bencana.	Indeks risiko bencana.
<i>SMART ENVIRONMENT</i>	Proteksi lingkungan (<i>protection</i>)	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas.	Indeks kualitas lingkungan hidup.
	Pengelolaan sampah dan limbah (<i>waste</i>)	Terwujudnya pengembangan sistem dan pengelolaan	Persentase pemenuhan prasarana penanganan persampahan/TP

DIMENSI	SUB-DIMENSI	SASARAN	INDIKATOR UTAMA
		persampahan regional.	S3R.
		Terwujudnya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak.
	Tata kelola energi (<i>energy</i>)	Penguatan upaya pencapaian ketersediaan energi.	Persentase tingkat ketersediaan energi.

Sumber: Hasil analisis, 2021

BAB 03

STRATEGI PEMBANGUNAN **SMART CITY**

BAB III

STRATEGI PEMBANGUNAN *SMART CITY*

3.1. *Smart Governance*

Smart Governance atau pemerintahan yang cerdas atau tata kelola yang cerdas merupakan komponen yang memfokuskan pada penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Bantul yang informatif, komunikatif, akuntabel dan transparan sehingga terciptanya *good governance*. Adapun strategi yang digunakan antara lain:

Tabel 3. 1 Strategi Sub-dimensi *Smart Governance*

Sub-dimensi	Strategi
Layanan publik (<i>services</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana, serta penyediaan kebutuhan masyarakat. b. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi untuk akses layanan dasar. c. Meningkatkan kapasitas SDM Penyedia layanan.
Birokrasi (<i>bureaucracy</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a. Efisiensi dan penyederhanaan prosedur birokrasi pelayanan. b. Optimalisasi pengembangan aplikasi <i>e-gov</i> menuju <i>integrated & inter-operability e-gov</i> atau yang saling berkomunikasi. c. Pembuatan SOP bersama pada Perangkat Daerah yang memiliki pelayanan publik yang sama. d. Meningkatkan kinerja birokrasi berbasis <i>agile government</i>. e. Mengoptimalkan sarana dan prasarana penunjang perencanaan pembangunan.
Perancangan kebijakan (<i>policy</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun kebijakan regulasi peraturan sebagai dasar pelayanan publik berbasis elektronik. b. Menyusun regulasi tentang penggunaan data dan keamanan data. c. Optimalisasi sistem informasi kebijakan pemerintah dalam bentuk website maupun aplikasi

Sumber: Hasil analisis, 2021

3.2. *Smart Branding*

Branding adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan, atau kombinasi dari semuanya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa atau kelompok penjual dan untuk mendiferensiasikannya (membedakan) dari barang atau jasa pesaing. *Smart Branding* ditujukan untuk mempromosikan, memasarkan potensi Kabupaten Bantul sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah. Adapun strategi yang digunakan antara lain:

Tabel 3. 2 Strategi Sub-dimensi *Smart Branding*

Sub-dimensi	Strategi
Pariwisata (<i>tourism</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a. Optimalisasi atraksi, akses, dan amenitas penunjang pariwisata. b. Optimalisasi penggunaan teknologi dalam memasarkan potensi wisata. c. Penyediaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia penunjang atraksi. d. Penguatan kapasitas Kelompok Sadar Wisata dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
Daya saing bisnis (<i>business</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a. Sinergisitas antara pengelolaan, pengembangan dengan pemasaran. b. Mengembangkan <i>platform marketplace</i> yang berfungsi untuk memasarkan produk. c. Regulasi dan kebijakan berkelanjutan dalam pengelolaan produk unggulan. d. Mengembangkan skema kolaborasi atau kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung potensi Kabupaten Bantul.
Wajah tampilan kota (<i>appearance</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a. Mewujudkan wajah tampilan Kabupaten Bantul yang menonjolkan nilai-nilai daerah. b. Mewujudkan wajah tampilan Kabupaten Bantul yang bersih dan rapi.

Sumber: Hasil analisis, 2021

3.3. *Smart Economy*

Smart Economy dalam *Smart City* dimaksudkan untuk mewujudkan ekosistem perekonomian sehingga menambah peluang usaha baru dan meningkatkan persaingan pasar usaha atau modal. Pemerintah Kabupaten Bantul dan masyarakatnya perlu mengelola sumber daya, menciptakan iklim investasi, serta menjalin kemitraan antara pemerintah Kabupaten Bantul dengan sektor swasta untuk menciptakan perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Adapun strategi yang digunakan antara lain:

Tabel 3. 3 Strategi Sub-dimensi *Smart Economy*

Sub-dimensi	Strategi
Ekosistem industri (<i>industry</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkuat industri berbasis potensi unggulan daerah. b. Memfasilitasi produsen untuk melakukan ekspansi pasar, dalam rangka perluasan pasar untuk produk-produk Kabupaten Bantul. c. Memfasilitasi pemanfaatan <i>marketplace</i> untuk produsen dan konsumen dalam memasarkan produk.
Kesejahteraan masyarakat (<i>welfare</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a. Mewujudkan program pemberdayaan masyarakat. b. Mengembangkan peluang usaha yang berbasis kemandirian ekonomi masyarakat.
Ekosistem transaksi keuangan (<i>transaction</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a. Optimalisasi transaksi keuangan digital yang <i>cash less</i>. b. Mendorong industri <i>marketplace</i> dan <i>e-commerce</i>.

Sumber: Hasil analisis, 2021

3.4. *Smart Living*

Smart Living merupakan cara pandang, pola pikir yang berujung pada paradigma kecermatan, praktis, dan kreatifitas. *Smart Living* berfokus pada pengelolaan kabupaten yang menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat. Adapun strategi yang digunakan antara lain:

Tabel 3. 4 Strategi Sub-dimensi *Smart Living*

Sub-dimensi	Strategi
Harmonisasi tata ruang (<i>harmony</i>)	a. Penyediaan sarana dan prasarana permukiman yang berkelanjutan. b. Mewujudkan perumahan di kawasan permukiman yang nyaman dan harmonis. c. Pembangunan fasilitas perkotaan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. d. Optimalisasi pembangunan dan monitoring pemanfaatan tata ruang yang dapat diakses oleh masyarakat melalui teknologi informasi.
Kesehatan (<i>health</i>)	a. Optimalisasi teknologi informasi dalam pemberian layanan kesehatan bagi masyarakat. b. Pengembangan fasilitas kesehatan bagi masyarakat.
Transportasi (<i>mobility</i>)	a. Peningkatan moda transportasi umum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. b. Mewujudkan pemerataan jaringan jalan yang memadai bagi masyarakat untuk mengakses lokasi-lokasi penting ke pusat-pusat perdagangan, pertanian, destinasi wisata dan lokasi strategis lainnya.

Sumber: Hasil analisis, 2021

3.5. *Smart Society*

Smart Society atau masyarakat cerdas diwujudkan dalam interaksi antar manusia yang terjalin semakin kuat dan tanpa sekat yang selaras dengan perkembangan teknologi. Dalam membangun *Smart City*, manusia atau dalam hal ini masyarakat memegang peranan yang penting. Mewujudkan ekosistem masyarakat yang cerdas dalam mengolah informasi, menciptakan hubungan yang komunikatif baik

antar warga maupun dengan pemerintah menjadi salah satu tujuan *Smart Society*. Adapun strategi yang digunakan antara lain:

Tabel 3. 5 Strategi Sub-dimensi *Smart Society*

Sub-dimensi	Strategi
Interaksi masyarakat (<i>community</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyediakan akses internet yang terhubung antar rumah tangga. b. Menyediakan akses internet bagi masyarakat umum. c. Menyediakan sarana dan pendukung dan penguatan kapasitas SDM penyuluh ketenagakerjaan. d. Pelatihan dan peningkatan SDM PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial).
Ekosistem belajar/pendidikan (<i>learning</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a. Optimalisasi sistem pendidikan cerdas (<i>e-learning</i>). b. Mewujudkan pemerataan akses internet di tempat pendidikan. c. Pengembangan budaya baca dan literasi digital. d. Meningkatkan kualitas SDM yang berkualitas melalui berbagai kegiatan, diseminasi, bimtek, dan lain sebagainya.
Keamanan masyarakat (<i>security</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemanfaatan teknologi informasi dalam <i>Early Warning System</i> (EWS). b. Mewujudkan sistem keamanan yang terintegrasi. c. Peningkatan keamanan melalui kelompok siskamling.

Sumber: Hasil analisis, 2021

3.6. ***Smart Environment***

Smart Environment dapat diartikan sebagai sebuah kondisi lingkungan yang bisa memberikan kenyamanan, keberlanjutan sumber daya, keindahan fisik maupun

non fisik, bagi masyarakat dan publik guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Adapun strategi yang digunakan antara lain:

Tabel 3. 6 Strategi Sub-dimensi *Smart Environment*

Sub-dimensi	Strategi
Proteksi lingkungan (<i>protection</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan sistem penanganan pencemaran lingkungan hidup. b. Optimalisasi ruang terbuka hijau. c. Optimalisasi data dan informasi Lingkungan Hidup Daerah (LHD). d. Menyesuaikan pembangunan lingkungan berdasarkan daya dukung lahan.
Pengelolaan sampah dan limbah (<i>waste</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a. Optimalisasi pengelolaan air limbah dalam lingkungan permukiman. b. Optimalisasi penanganan sampah sampai ditingkat desa/kelurahan dari sumber sampah sampai ke TPA.
Tata kelola energi (<i>energy</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan kegiatan pengolahan sampah dan limbah sebagai energi. b. Optimalisasi program kegiatan berbasis penggunaan energi terbarukan.

Sumber: Hasil analisis, 2021

BAB 04

RENCANA AKSI **SMART CITY**

BAB IV

RENCANA AKSI *SMART CITY*

4.1. Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan *Smart City*

Kebijakan dan kelembagaan menjadi salah satu aspek yang perlu disiapkan sebagai payung atau landasan implementasi program kegiatan *Smart City*. Aspek kebijakan merupakan salah satu aspek yang diperlukan bagi Kabupaten Bantul dalam menjamin keberlanjutan sebuah program pembangunan. Kebijakan dapat diartikan sebagai arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mencapai tujuan. Sedangkan kelembagaan merupakan perangkat non-fisik yang menentukan keberlanjutan pelaksanaan *Smart City* di Kabupaten Bantul dari sisi pengelola kota.

4.1.1. Kebijakan

- a. Penetapan kebijakan regulasi tentang Organisasi Pengelola *Smart City*: Dewan *Smart City* Kabupaten Bantul dan Tim Pelaksana *Smart City* Kabupaten Bantul;
- b. Penetapan regulasi yang menjamin keberlanjutan program masterplan pada dimensi *Smart Governance*, *Smart Branding*, *Smart Economy*, *Smart Living*, *Smart Society*, dan *Smart Environment* yang saling terintegrasi;
- c. Penetapan berbagai regulasi pendukung dalam mencapai *Smart City* Kabupaten Bantul meliputi standarisasi metadata, aset informasi, pemanfaatan *software* Legal (*Open Source* dan *Proprietary*), pemanfaatan akses informasi, keamanan informasi dan *incident handling*, layanan publik berbasis elektronik, dan proses birokrasi berbasis elektronik / SPBE;
- d. Kebijakan Infrastruktur TIK terpadu; dan
- e. Kebijakan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan berpedoman pada indikator keberhasilan dalam Masterplan *Smart City* Kabupaten Bantul.

4.1.2. Kelembagaan

- a. Pembentukan Dewan *Smart City* Kabupaten Bantul

Dewan *Smart City* Kabupaten Bantul merupakan lembaga multi pihak yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Bantul yang bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi sebagai pengelola *Smart City*. Pembentukan Dewan *Smart City* Kabupaten Bantul berfungsi sebagai wadah partisipasi antar sektor dan antar elemen dalam melakukan percepatan pembangunan dan pelaksanaan *Smart City* sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul di dalam Masterplan *Smart City*.

Kewenangan Dewan *Smart City* Kabupaten Bantul yaitu:

- 1) Menetapkan standar pelayanan *Smart City* di Kabupaten Bantul;
- 2) Melakukan supervisi, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan *Smart City* Kabupaten Bantul;
- 3) Memberikan persetujuan dan dukungan bagi usulan kebijakan, rencana kerja dan inisiatif strategis teknologi informasi dalam *Smart City*;
- 4) Membentuk tim penasehat/pakar sesuai kebutuhan;
- 5) Menghadirkan personil di luar anggota komite sesuai kebutuhan; dan
- 6) Melaksanakan kajian dan penelitian dalam rangka percepatan pembangunan dan pelaksanaan *Smart City* di Kabupaten Bantul.

Tugas dan Kewajiban Dewan *Smart City* Kabupaten Bantul yaitu:

- 1) Memberikan arahan aspek strategis teknologi informasi dalam *Smart City* dan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi;
- 2) Memberikan masukan kepada Tim Pelaksana *Smart City* Kabupaten Bantul terkait pelaksanaan program dan kegiatan *Smart City*;
- 3) Menampung dan membahas usulan, kebutuhan, dan aspirasi Perangkat Daerah;
- 4) Memberikan rekomendasi kebijakan kepada Bupati Bantul untuk mendorong terjadinya percepatan pembangunan dan pelaksanaan *Smart City*;
- 5) Menerima saran dan masukan dari masyarakat terkait percepatan pembangunan dan pelaksanaan *Smart City* di Kabupaten Bantul;
- 6) Melaksanakan rapat koordinasi dengan Tim Pelaksana *Smart City* Kabupaten Bantul terkait pelaksanaan program dan kegiatan *Smart City* sekurang-kurangnya satu bulan sekali;
- 7) Membahas hasil asesmen/audit internal dan independen sebagai materi evaluasi; dan
- 8) Melakukan pelaporan kepada Bupati Bantul terkait perkembangan pelaksanaan *Smart City*.

b. Pembentukan Tim Pelaksana *Smart City* Kabupaten Bantul

Tim Pelaksana *Smart City* Kabupaten Bantul merupakan lembaga multi sektor didalam Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai wadah koordinasi antar sektor terkait pelaksanaan program dan kegiatan *Smart City* Kabupaten Bantul. Tim Pelaksana *Smart City* Kabupaten Bantul dibentuk untuk menjamin terjadinya sinkronisasi antara Masterplan *Smart City* dengan program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPd, maupun Renja Perangkat Daerah.

Kewenangan Tim Pelaksana *Smart City* Kabupaten Bantul, antara lain:

- 1) Mengusulkan program dan kegiatan *Smart City* untuk dimasukkan ke dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah; dan
- 2) Mengusulkan pagu anggaran kegiatan *Smart City* di dalam KUA-PPAS kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Tugas dan Kewajiban Dewan *Smart City* Kabupaten Bantul yaitu:

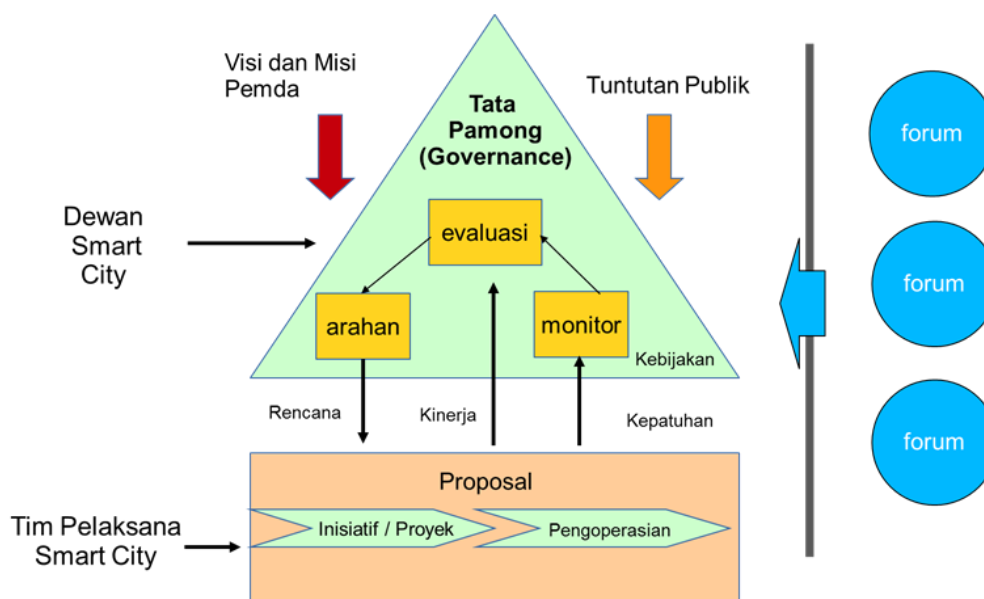
- 1) Menjamin sinkronisasi antara program dan kegiatan *Smart City* di dalam Masterplan *Smart City* Kabupaten Bantul dengan program dan kegiatan pembangunan di dalam dokumen rencana pembangunan Kabupaten Bantul, baik RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah;
- 2) Menjamin pelaksanaan program dan kegiatan *Smart City* di Kabupaten Bantul;
- 3) Melakukan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan *Smart City* kepada Bupati Bantul dan Dewan *Smart City* Kabupaten Bantul;
- 4) Menghadiri rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Dewan *Smart City* Kabupaten Bantul;
- 5) Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan TAPD terkait perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan *Smart City* di Kabupaten Bantul; dan
- 6) Melaksanakan masukan yang diberikan oleh Dewan *Smart City* Kabupaten Bantul terkait program dan kegiatan *Smart City*.

c. Pembentukan Forum *Smart City*

Pembentukan forum-forum pendukung *Smart City* di Kabupaten Bantul yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi publik dan mengakomodir kepentingan berbagai kalangan terhadap pelaksanaan *Smart City*. Forum-forum pendukung *Smart City* dapat dikembangkan dengan inisiatif pemerintah maupun inisiatif warga masyarakat, namun harus dikelola secara partisipatif oleh pemerintah agar berjalannya forum-forum tersebut berkorelasi positif terhadap pelaksanaan *Smart City*. Disamping itu, forum-forum tersebut tidak harus dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, namun dapat dikelola oleh Perangkat Daerah sesuai dengan sektor dan bidangnya. Beberapa contoh forum yang terdapat di Kabupaten Bantul dan dapat diberdayakan untuk mendukung pelaksanaan *Smart City* antara lain:

- Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Bantul;
- Forum Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Bantul;
- Forum Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Forum Komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat (Forkom KIM) Kabupaten Bantul;

- Forum Sistem Informasi Desa (SID) Kabupaten Bantul;
- Forum Pemantau Independen (FORPI) Kabupaten Bantul;
- Forum Komunikasi Kabupaten Sehat Kabupaten Bantul;
- Forum Komunikasi Kesehatan Desa Kabupaten Bantul;
- Forum Komunikasi Ormas dan Relawan Kabupaten Bantul;
- Forum BUMDES Kabupaten Bantul;
- Forum Anak Bantul Kabupaten Bantul;
- Forum Data Pilah Gender dan Anak Kabupaten Bantul;
- Forum Pewarta Kabupaten Bantul;
- Forum Komunikasi Kepotrak Kabupaten Bantul, dan
- Forum Bisnis Industri Pariwisata Kabupaten Bantul.



Gambar 4. 1 Forum *Smart City*

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2021

4.2. Pengembangan Infrastruktur Pendukung *Smart City*

Infrastruktur dan sarana TIK menjadi faktor pendukung atau *enabler* yang tidak kalah penting dalam implementasi *Smart City*. Infrastruktur mampu mempercepat, mempermudah, dan menyederhanakan proses menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien. Secara umum, infrastruktur pendukung dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: infrastruktur fisik maupun infrastruktur digital.

4.2.1. Infrastruktur Fisik

- Tersedianya Bantul *Command Center* (Pusat Kendali);
- Tersedianya ruang *server*; dan
- Tersedianya 28 titik CCTV pada Tahun 2021.

4.2.2. Infrastruktur Digital

- Tersedianya *Data Center* (Pusat Data) yang dapat dimanfaatkan bersama oleh seluruh aplikasi dengan kapasitas CPU 225 Ghz, *memory* kapasitas 1,47 TB, *storage space* kapasitas 39 TB, *power supply* kapasitas 23 KVA, *Core Network Bandwith* (lokal) kapasitas 1.000 Gbps, serta internet *bandwidth* kapasitas 3.500 Mbps;
- Tersedianya *Disaster Recovery Center* (DRC) *backup* DRC yang dilakukan secara periodik;
- Tersedia pusat kendali jaringan, data, serta pusat kendali operasi;
- Jaringan *Fiber Optic* (FO) telah terbangun sepanjang 200 Km di 45 OPD, 17 Kapanewon, 23 Puskesmas, 12 desa, 2 sekolah, dan lain-lain;
- Jaringan koneksi radio *wireless* di 63 desa, 4 puskesmas, dan 34 sekolah;
- Bandwidth* internet Kabupaten Bantul mencapai 190 Mbps (*up to*);
- Terdapat 68 titik *wifi* public pada Tahun 2021;
- Pemanfaatan teknologi *Cloud Computing*; dan
- Pemanfaatan API untuk berbagi data antar instansi.

4.3. Pengembangan Sistem Informasi *Smart City*

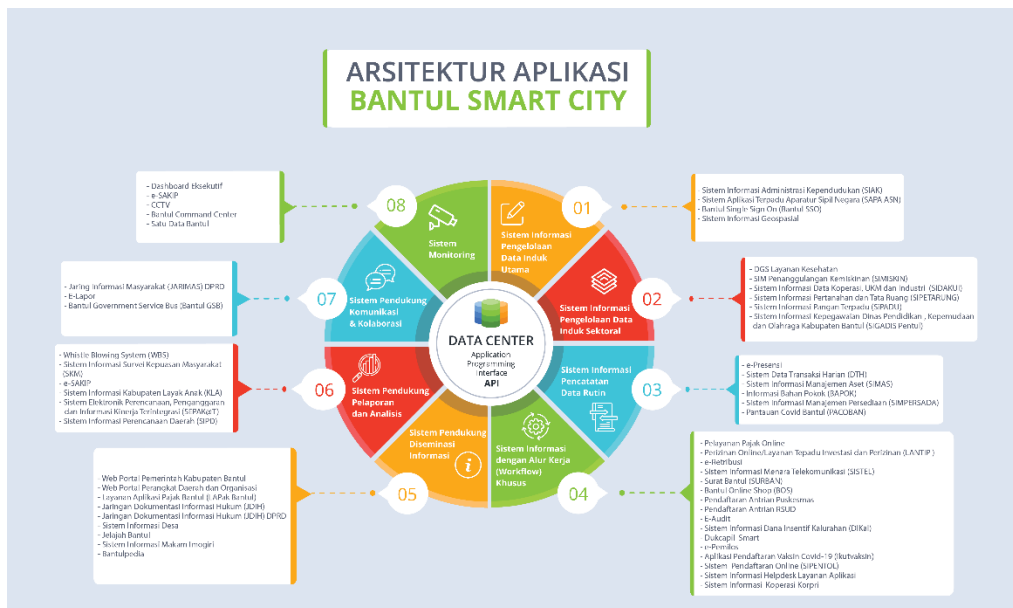
Kategori dan masing-masing sistem informasi di Kabupaten Bantul, yaitu:

No	Kategori Sistem Informasi	Aplikasi
1	Sistem Informasi Pengelolaan Data Induk Utama	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK)
		Sistem Aplikasi Terpadu Aparatur Sipil Negara (SAPA ASN)
		Bantul <i>Single Sign On</i> (Bantul SSO)
		Sistem Informasi Geospasial
		Portal Satu Data
2	Sistem Informasi Pengelolaan Data Induk Sektoral	DGS Layanan Kesehatan
		SIM Penanggulangan Kemiskinan (SIMISKIN)
		Sistem Informasi Data Koperasi, UKM dan Industri (SIDAKUI)
		Sistem Informasi Pertanahan dan Tata Ruang (SIPETARUNG)
		Sistem Informasi Pangan Terpadu (SiPADU)

No	Kategori Sistem Informasi	Aplikasi
		Sistem Informasi Kepegawaian Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul (SIGADIS Pentul)
3	Sistem Informasi Pencatatan Data Rutin	e-Presensi
		Sistem Data Transaksi Harian (DTH)
		Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMAS)
		Informasi Bahan Pokok (BAPOK)
		Sistem Informasi Manajemen Persediaan (SIMPERSADA)
		Pantauan COVID Bantul (PACOBAN)
4	Sistem Informasi dengan Alur Kerja (Workflow) Khusus	Pelayanan Pajak <i>Online</i>
		Perizinan <i>Online</i> /Layanan Terpadu Investasi dan Perizinan (LANTIP)
		e-Retribusi
		Sistem Informasi Menara Telekomunikasi (SISTEL)
		Surat Bantul (SURBAN)
		Bantul <i>Online Shop</i> (BOS)
		Pendaftaran Antrian Puskesmas
		Pendaftaran Antrian RSUD
		<i>E-Audit</i>
		Sistem Informasi Dana Insentif Kalurahan (DIKAl)
		Dukcapil <i>Smart</i>
		e-Pemilos
		Aplikasi Pendaftaran Vaksin COVID-19 (ikut vaksin)
		Sistem Pendaftaran <i>Online</i> (SIPENTOL)
5	Sistem Pendukung Diseminasi Informasi	Sistem Informasi <i>Helpdesk</i> Layanan Aplikasi
		Sistem Informasi Koperasi Korpri
		<i>Web Portal</i> Pemerintah Kabupaten Bantul
		<i>Web Portal</i> Perangkat Daerah dan Organisasi
		Layanan Aplikasi Pajak Bantul (LAPak Bantul)
		Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH)

No	Kategori Sistem Informasi	Aplikasi
		Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) DPRD
		Sistem Informasi Desa
		Jelajah Bantul
		Sistem Informasi Makam Imogiri
		Bantulpedia
6	Sistem Pendukung Pelaporan dan Analisis	<i>Whistle Blowing System</i> (WBS)
		Sistem Informasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
		e-SAKIP
		Sistem Informasi Kabupaten Layak Anak (KLA)
		Sistem Elektronik Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja Terintegrasi (SEPAK@T)
		Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD)
7	Sistem Pendukung Komunikasi & Kolaborasi	Jaring Informasi Masyarakat (JARIMAS) DPRD
		E-Lapor
		Bantul <i>Government Service Bus</i> (Bantul GSB)
8	Sistem Monitoring	<i>Dashboard</i> Eksekutif
		e-SAKIP
		CCTV
		Bantul <i>Command Center</i>
		Satu Data Bantul

Sumber: Hasil analisis, 2021



Gambar 4. 2 Kerangka Arsitektur Perangkat Lunak *Smart City* Kab. Bantul
Sumber: Hasil analisis, 2021

4.4. Penguatan Literasi *Smart City*

Rendahnya literasi masyarakat bila tidak ditanggulangi dengan baik dapat menghambat tercapainya sasaran pengembangan *Smart City*. Oleh karena itu, rencana aksi penguatan literasi menjadi penting dilakukan melalui: peningkatan kualitas SDM pemerintah, *Smart City* Forum, dan masyarakat serta dengan pembekalan keterampilan atau *skill* yang mendukung implementasi *Smart City*. Penguatan literasi dilaksanakan berkesinambungan melalui bimtek, *Focus Group Discussion* (FGD), sosialisasi, dan seminar tentang *Smart City*. Setiap pengembangan aplikasi dan layanan publik *online* memerlukan sosialisasi dan FGD pada awal pengembangan, saat uji coba, dan saat implementasi. Selanjutnya dilakukan bimtek penggunaan aplikasi, pemeliharaan aplikasi, dan pengamanan aplikasi.



BAB 05

PETA JALAN PEMBANGUNAN **SMART CITY**

BAB V

PETA JALAN PEMBANGUNAN *SMART CITY*

5.1. Peta Jalan *Smart City*

Peta jalan pembangunan *Smart City* Kabupaten Bantul yang dibagi berdasarkan enam dimensi *Smart City* yaitu *Smart Governance*, *Smart Branding*, *Smart Economy*, *Smart Living*, *Smart Society*, dan *Smart Environment*. Peta jalan pembangunan *Smart City* berisi rencana aksi program kegiatan Kabupaten Bantul yang dibagi menjadi tiga bagian yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Selanjutnya berdasarkan program kegiatan *Smart City* dianalisis indikator kinerja dan indikator SNI 37122:2019 sebagai acuan dalam pengukuran keberhasilan program kegiatan yang akan diimplementasikan.

No	Misi Pembangunan	Dimensi Smart City	Sub Dimensi	Sasaran	Indikator Utama	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan (2021-2023)	Inovasi	Indikator Keberhasilan	Indikator SNI	Anggaran/Tahun Pelaksanaan					Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah	
												2018	2019	2020	2021	2022			2023
Program Jangka Pendek																			
1	Misi 1	Smart Governance	Birokrasi (bureaucracy)	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bantul yang berkualitas.	Indeks Reformasi Birokrasi	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Pengarusutamaan SDGs (Sustainable Development Goals) Dalam Perencanaan Pembangunan dengan Penyusunan draft Rencana Aksi Daerah (RAD) di Kabupaten Bantul	1. Penyusunan Dokumen RPJMD tahun 2021 - 2026 secara lengkap sudah dilandasi atas hasil evaluasi dan proyeksi capaian pembangunan berdasarkan 17 goals SDGs secara sinergi dan berkelanjutan 2. Dokumen RAD SDGs dapat dijadikan bahan penyusunan renstra Perangkat daerah untuk periode 2021-2026 3. Memudahkan Pemkab. Bantul dalam hal pelaporan capaian SDGs ke Pemda. DIY	Jumlah warga kota per 100.000 penduduk yang terlibat dalam proses perencanaan							APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	-						220.540.000	250.500.000				
2	Misi 1	Smart Governance	Birokrasi (bureaucracy)	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bantul yang berkualitas.	Indeks Reformasi Birokrasi	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Early Warning Systems pada Sistem Pendampingan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan oleh Rumpun Bidang terhadap Perangkat Daerah di Bappeda Kabupaten Bantul	Kepala OPD dapat mengetahui secara dini capaian fisik keuangan dari target yang di tetapkan setiap bulan/pertriwulan	-							APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	-						137.450.500	143.623.000				
3	Misi 1	Smart Governance	Birokrasi (bureaucracy)	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bantul yang berkualitas.	Indeks Reformasi Birokrasi	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Belanja Jasa Honorarium	Pelayanan	Pengelolaan media dan data desa	Pengelolaan data terintegrasi	Jumlah warga kota per 100.000 penduduk yang terlibat dalam proses perencanaan				91.050.000	79.150.000	96.000.000	DD	Desa Panggungharjo
4	Misi 1	Smart Governance	Layanan publik (service)	Mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien yang didukung oleh sumber daya manusia dan Teknologi Informasi (IT) yang memadai.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Konsultasi dan Monitoring Pajak Daerah	Validasi Selasa Sehari (SISARI)	Kecepatan dan kemudahan pelaporan BPHTB	Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring							APBD	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
						Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Validasi Sehari BPHTB	-											
5	Misi 1	Smart Governance	Layanan publik (service)	Mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien yang didukung oleh sumber daya manusia dan Teknologi Informasi (IT) yang memadai.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Pelayanan Mobil Keliling	1. Layanan pembayaran PBB menjangkau sampai ke wilayah pedesaan, 2. Pola layanan pembayaran PBB menjadi proaktif (Jemput bola mendatangi masyarakat) 3. Pelayanan PBB tidak hanya pada hari dan jam kerja tetapi juga pada hari libur dan malam hari, 4. Kepatuhan pembayaran PBB meningkat, 5. Masyarakat bisa melakukan pembetulan PBB melalui layanan Mobil Keliling Pajak Bantul	Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring					561.163.980	1.644.133.160	APBD	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
						Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pelayanan Pajak Daerah	-				316.875.000	361.475.000	548.281.000	575.160.000				
6	Misi 1	Smart Governance	Layanan publik (service)	Mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien yang didukung oleh sumber daya manusia dan Teknologi Informasi (IT) yang memadai.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Kepegawaian Daerah	Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Pegawai	Pengelolaan Data Kepegawaian	SAPAA ASN (Aplikasi Pelayanan Terpadu Aparatur Sipil Negara)	1. Update data pegawai secara berkala 2. Kemudahan dalam pelayanan dan mengurangi pelayanan face to face	Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring					1.285.242.740	1.335.135.500	APBD	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Rapat rapat, Koordinasi dan Konsultasi	-					1.017.742.000	1.350.000.000	1.350.000.000				
7	Misi 1	Smart Governance	Layanan publik (service)	Mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien yang didukung oleh sumber daya manusia dan Teknologi Informasi (IT) yang memadai.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	E-Retribusi Pelayanan Persampahan	Masyarakat bisa mengecek tagihan via Bank BPD dan banyaknya metode pembayaran (ATM, go pay) memudahkan masyarakat	Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring					441.394.898	496.620.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-						615.000.000	615.740.000				
8	Misi 1	Smart Governance	Layanan publik (service)	Mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien yang didukung oleh sumber daya manusia dan Teknologi Informasi (IT) yang memadai.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Penunjang Urusan Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah/ Kab Kota	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	E-Retribusi Pasar	Mengurangi penyelewengan retribusi pasar, meningkatkan PAD serta memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membayar retribusi	Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring					390.177.000	429.194.700	APBD	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
						Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian dan Ketatausahaan	-					72.025.000	92.340.577	102.049.794				
9	Misi 1	Smart Governance	Layanan publik (service)	Mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien yang didukung oleh sumber daya manusia dan Teknologi Informasi (IT) yang memadai.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Robot Uji Kolong Perhubungan Bantul (ROJIKO HUBBA)	1. Efisien waktu dalam pemeriksaan karena pemeriksaan cukup dilakukan melalui monitor. 2. Transparansi dalam pemeriksaan 3. Hasil pemeriksaan tersimpan dalam database yang dapat diakses ketika dibutuhkan	Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring					949.300.000		APBD	Dinas Perhubungan
						Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	-	-						943.221.604	990.382.685				
10	Misi 1	Smart Governance	Layanan publik (service)	Mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien yang didukung oleh sumber daya manusia dan Teknologi Informasi (IT) yang memadai.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Sistem Pendaftaran Online (SIPENTOL)	1. Sipentol tidak hanya dapat digunakan untuk pendaftaran tapi juga dapat digunakan untuk pembayaran 2. Dengan tanda tangan digital, keamanan dan keabsahan dokumennya terjamin	Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring					949.300.000		APBD	Dinas Perhubungan
						Program Peningkatan Pengelolaan Perizinan	Pengelolaan Perizinan On Line	-					200.000.000	220.000.000	240.000.000				
11	Misi 1	Smart Governance	Layanan publik (service)	Mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien yang didukung oleh sumber daya manusia dan Teknologi Informasi (IT) yang memadai.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Program Pengembangan Perumahan	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Penata Usahaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Aplikasi Rusunawa (KASINAWA) Pembayaran E-Retribusi Rusunawa	Pengelola dapat melakukan pengawasan dengan mudah terhadap pembayaran rusunawa	Presentase izin bangunan yang diajukan melalui sistem pengiriman elektronik					3.214.070.466	3.435.135.441	APBD	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
						Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	-					2.151.641.000	2.186.389.136	2.229.958.593				
12	Misi 1	Smart Governance	Layanan publik (service)	Mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien yang didukung oleh sumber daya manusia dan Teknologi Informasi (IT) yang memadai.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Smart	Akta Kematian Sehari Jadi (Aksi Simpati)	Jumlah penduduk Bantul yang meninggal dapat langsung diberikan Akta Kematian dan Dokumen Kependudukan bagi ahli waris	Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring					163.643.340		APBD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Program Keserasian Kebijakan Kependudukan	Inovasi Pelayanan Pencatatan Sipil	-				715.000.000	713.200.000	790.000.000	796.000.600				
13	Misi 1	Smart Governance	Layanan publik (service)	Mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien yang didukung oleh sumber daya manusia dan Teknologi Informasi (IT) yang memadai.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	-	Legalisir Online Mudah Akurat Sempel (Leontin Mas)	Efisiensi Layanan bagi pemohon	Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring					351.849.829		Non Anggaran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14	Misi 1	Smart Governance	Layanan publik (service)	Mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien yang didukung oleh sumber daya manusia dan Teknologi Informasi (IT) yang memadai.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Pengelolaan PIAK	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Data dan Penyajian Data Kependudukan	-	Perekaman KTPel Plus Test Golongan Darah (PAGODA)	Elemen data golongan darah dalam wajib KTP sudah terisi semua	Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring					138.161.220		APBD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Program Pengelolaan Data Kependudukan	Pemuthakiran Data Kependudukan	-							90.674.000				
15	Misi 1	Smart Governance	Layanan publik (service)	Mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien yang didukung oleh sumber daya manusia dan Teknologi Informasi (IT) yang memadai.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Pengelolaan PIAK	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Data dan Penyajian Data Kependudukan	-	KAPERU (KK Baru untuk Pengantin Baru)	Percepatan penerbitan KK dan KTP baru (karena ganti status)	Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring					138.161.220		DAK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Program Pengelolaan Data Kependudukan	Pemuthakiran Data Kependudukan	-				80.000.000	73.350.000	80.500.000	90.674.000				

No	Misi Pembangunan	Dimensi Smart City	Sub Dimensi	Sasaran	Indikator Utama	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan (2021-2023)	Inovasi	Indikator Keberhasilan	Indikator SNI	Anggaran/Tahun Pelaksanaan						Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah	
												2018	2019	2020	2021	2022	2023			
16	Misi 1	Smart Governance	Layanan publik (service)	Mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien yang didukung oleh sumber daya manusia dan Teknologi Informasi (IT) yang memadai.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Pengelolaan PIAK	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Data dan Penyajian Data Kependudukan	-	MOROLEGA (Mobil Operasional Layanan Administrasi Kependudukan Efektif Sekaligus Akurat)	Masyarakat dimudahkan karena tidak perlu datang ke capil terutama lansia dimana petugas akan datang langsung sampai depan rumah penduduk.	Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring					138.161.220		DAK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
						Program Pengelolaan Data Kependudukan	Pemutakhiran Data Kependudukan	-					73.350.000	80.500.000	90.674.000					
17	Misi 1	Smart Governance	Layanan publik (service)	Mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien yang didukung oleh sumber daya manusia dan Teknologi Informasi (IT) yang memadai.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Integrasi Sistem Informasi Desa dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Proses pelayanan di desa lebih cepat, data kependudukan lebih valid, masyarakat terbantu apabila ingin mengetahui data baik itu tentang potensi desa ataupun data tentang kependudukan, serta meningkatnya kualitas pelayanan di masyarakat	-							-	Dinas Komunikasi dan Informatika	
						Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	-				2.826.149.400	5.273.346.600	5.522.894.300	5.812.394.298					
18	Misi 1	Smart Governance	Layanan publik (service)	Mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien yang didukung oleh sumber daya manusia dan Teknologi Informasi (IT) yang memadai.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Paket Sari (Pelayanan Perizinan Keliling Terbit Satu Hari)	Layanan perijinan IMB dapat lebih cepat	-					604.839.580		APBD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
						Program Peningkatan Pengelolaan Perizinan	Operasional Pelayanan Perizinan	-						77.000.000	80.000.000					
19	Misi 1	Smart Governance	Layanan publik (service)	Mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien yang didukung oleh sumber daya manusia dan Teknologi Informasi (IT) yang memadai.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan	e-LASTRI (Layanan Administrasi Tanpa Antri)	Efektivitas pelayanan publik dalam rangka mewujudkan pelayanan prima	Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring		327.305.000	522.146.000	175.044.500	331.904.000		APBKal	Desa Srimulyo	
20	Misi 2	Smart Governance	Layanan publik (service)	Mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien yang didukung oleh sumber daya manusia dan Teknologi Informasi (IT) yang memadai.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan	e-SAMBAT (Saluran Aspirasi Masyarakat Berbasis TI)	Masyarakat memiliki wadah untuk melakukan permohonan informasi atau pengaduan yang responsif	Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring		327.305.000	522.146.000	175.044.500	331.904.000		APBKal	Desa Srimulyo	
21	Misi 3	Smart Governance	Layanan publik (service)	Mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien yang didukung oleh sumber daya manusia dan Teknologi Informasi (IT) yang memadai.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Kalurahan dan Data Spasial Kalurahan	SIGAP (Sistem Informasi Geografi Pertanahan)	Pemerintah Kalurahan memiliki basis data yang lengkap, utamanya dalam bidang pertanahan dan kesejahteraan sosial sehingga mampu menjadi landasan pengambilan kebijakan secara tepat	Jumlah kunjungan daring tahunan ke portal data terbuka per 100.000 penduduk		64.825.000	47.000.000	36.565.500	118.685.000		APBKal, CSR	Desa Srimulyo	
22	Misi 1	Smart Governance	Layanan publik (service)	Mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien yang didukung oleh sumber daya manusia dan Teknologi Informasi (IT) yang memadai.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kapanewon	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Tim Sahabat APBDES	Desa dapat membuat laporan tidak terlambat & penyerapan meningkat	-					27.612.500		APBD	Kapanewon Pajangan	
						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	-							137.000.000					
23	Misi 1	Smart Governance	Layanan publik (service)	Mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien yang didukung oleh sumber daya manusia dan Teknologi Informasi (IT) yang memadai.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Fasilitasi Informasi Pelayanan Masyarakat	IPPAK (Informasi Pelayanan Pandak)	Prosedur dan syarat-syarat berkaitan terkait pelayanan terpadu dapat diketahui secara luas oleh masyarakat melalui leaflet dan media sosial.	Jumlah kunjungan daring tahunan ke portal data terbuka per 100.000 penduduk					14.950.000		APBD	Kapanewon Pandak	
						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	-							185.000.000					
24	Misi 3	Smart Branding	Pariwisata (tourism)	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul.	Cakupan peningkatan destinasi pariwisata.	Pengembangan Pemasaran	Pemasaran Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	Penyediaan Data Dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten / Kota, Baik Dalam dan luar Negeri	Jelajah Bantul	1. Pengunduh aplikasi Jelajah 2. Jumlah pengunjung 3. Data objek wisata	Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring					966.800.000		APBD dan CSR	Dinas Pariwisata	
Pengembangan Pemasaran						Pemasaran Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik di Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten Bantul	Tourism Information Center (TIC)	Jumlah wisatawan yang mengunjungi TIC	-							APBD dan CSR	Dinas Pariwisata		
Pengembangan Pemasaran						Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Bantul	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Promosi Pariwisata Melalui Kemitraan dengan Vlogger dan Blogger	Jumlah pengunjung yang mendapatkan informasi objek wisata dari vlogger dan blogger	Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring								APBD dan CSR	Dinas Pariwisata	
26											Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	-							
27	Misi 3	Smart Economy	Ekosistem industri (industry)	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas.	Capaian jaringan kabupaten kreatif.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar Sehat Bantul (PASEBAN)	Penataan pedagang dan zonasi pedagang lebih baik	-					5.059.168.213	6.079.427.982	APBD	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
Program Penataan Pasar Rakyat						Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar Rakyat	-	-				3.362.983.535	3.540.245.029	4.089.141.011						
28	Misi 3	Smart Economy	Ekosistem industri (industry)	Mewujudkan ekosistem yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan Kabupaten Bantul.	Laju pertumbuhan ekonomi.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jemput Bola untuk Pemotongan Hewan (SIJEMPOL)/ RPH 24 jam	Peningkatan produksi daging yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk					276.870.248		APBD	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
						Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Pendukung Kegiatan UPT (unit Pelaksana Teknis) Rumah Pemotongan Hewan	-				216.600.000	485.275.600	507.000.000	532.340.000					
29	Misi 3	Smart Economy	Ekosistem transaksi keuangan (transaction)	Terciptanya pengelolaan keuangan yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.	Opini BPK terhadap laporan keuangan.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Paket Sembako dan Produk UKM	BUMDes	Aplikasi pasardesa.id	KPM dapat berbelanja melalui pasardesa.id	Jumlah pendapatan tahunan yang dikumpulkan dari ekonomi berbagi sebagai persentase pendapatan sumber sendiri					82.907.870	109.885.000		DD	Desa Panggungharjo
							Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	-						45.169.500						
30	Misi 3	Smart Economy	Ekosistem transaksi keuangan (transaction)	Terciptanya pengelolaan keuangan yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.	Opini BPK terhadap laporan keuangan.	Penyelenggaran Layanan Perbankan	Digitalisasi Layanan Perbankan	-	SMS Notification	Nasabah memanfaatkan layanan sms notifikasi	Persentase pembayaran ke kota yang dibayar secara elektronik berdasarkan faktur ekonomi					40.000.000	-	Ops Bank	Bank Bantul	
31	Misi 3	Smart Economy	Kesejahteraan masyarakat (welfare)	Turunnya jumlah masyarakat kurang mampu.	Tingkat kemiskinan.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KRETEK MENYAPA	Promosi potensi lokal untuk peningkatan kesejahteraan	Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk							APBD	Kapanewon Kretek	
						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-												
32	Misi 3	Smart Economy	Kesejahteraan masyarakat (welfare)	Turunnya jumlah masyarakat kurang mampu.	Tingkat kemiskinan.	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	SANDEN FAIR	Mempromosikan potensi lokal agar meningkatkan pendapatan masyarakat	Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk							APBD	Kapanewon Sanden	
						Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan	-				48.500.000	40.685.000							
33	Misi 5	Smart Living	Harmonisasi tata ruang (harmony)	Mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak dan berkelanjutan.	Indeks pembangunan infrastruktur	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan	pEmanfaatan Lahan kOsong Di kantor Kecamatan sAnden (ELODEA)	Pemanfaatan lahan kosong untuk tanaman pangan sekaligus sebagai penghijauan	-					14.797.500		APBD	Kapanewon Sanden	
						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Rakor dan Konsultasi	-							90.000.000					
34	Misi 5	Smart Living	Kesehatan (health)	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi.	Usia Harapan Hidup.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Pembukaan Rumah sakit lapangan khusus COVID-19 untuk ODP /Orang Dalam Pemantauan dan PDP (gejala ringan & sedang)	Terbanggunya rumah sakit khusus COVID-19	-					21.022.955.115		APBD	Dinas Kesehatan	
						Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	-						719.076.834	755.030.675					

No	Misi Pembangunan	Dimensi Smart City	Sub Dimensi	Sasaran	Indikator Utama	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan (2021-2023)	Inovasi	Indikator Keberhasilan	Indikator SNI	Anggaran/Tahun Pelaksanaan						Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah				
												2018	2019	2020	2021	2022	2023						
35	Misi 5	Smart Living	Kesehatan (health)	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi.	Usia Harapan Hidup.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Publik (SIGAP) – Public Safety Center (PSC) 119	1. Tingkat utilisasi (masyarakat yang mengakses) ke SIGAP – PSC 119 Bantul 2. Prosentase kasus Gadar yang tertangani melalui SIGAP – PSC 119 Bantul	Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan					21.022.955.116		APBD dan DAK	Dinas Kesehatan				
						Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Pembangunan, Perluasan, dan Rehab Puskesmas, Pustu dan Jaringannya	-					4.273.500.000	4.573.500.000	4.773.500.000								
36	Misi 5	Smart Living	Kesehatan (health)	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi.	Usia Harapan Hidup.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	Digital Government Service (DGS) Layanan Kesehatan	Masyarakat mendapat pelayanan yang cepat serta mudah dalam faskes tingkat I maupun rujukan ke rumah sakit yang telah terintegrasi dengan BPJS	Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan					21.022.955.118	24.842.065.331	APBD	Dinas Kesehatan				
						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	-					1.040.642.400	1.088.302.400	1.197.132.640	1.207.079.685							
37	Misi 5	Smart Living	Kesehatan (health)	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi.	Usia Harapan Hidup.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Perawat Desa	Terlaksananya pemeriksaan kesehatan rutin dasar bagi lansia	Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan					71.010.000	93.850.000,00	DD, PAD	Desa Panggungharjo				
						Sub Bidang Kesehatan	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	-						1.105.000									
38	Misi 5	Smart Living	Kesehatan (health)	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi.	Usia Harapan Hidup.	Satgas Covid-19	Tim Panggung Tanggap Covid-19	Pemerintahan	Panggung Tanggap Covid-19	Penanganan warga yang terkena dampak pandemi	Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan					44.283.500	10.000.000	DD	Desa Panggungharjo				
						Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kalurahan	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	-															
						Bidang Penanggulan Bencana Darurat								773.700.000									
39	Misi 5	Smart Living	Kesehatan (health)	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi.	Usia Harapan Hidup.	Pembinaan Pramurukti Wreda	Pembinaan Satuan Tugas Pramurukti Wredha	Pembinaan	Satgas Pramurukti Wredha	Jumlah lansia yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan perbulan	Jumlah janji temu medis tahunan yang dilakukan melalui jarak jauh per 100.000 penduduk					412.421.000		APBKal	Desa Srimulyo				
						Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	Pembangunan Sub Bidang Kesehatan	-					250.675.000	259.153.000	242.198.000								
40	Misi 5	Smart Living	Kesehatan (health)	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi.	Usia Harapan Hidup.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	Penyuluhan Kesehatan Dengan Barcode Langkah Online (PAKDE BLANGKON)	Jumlah pasien yang memanfaatkan layanan Kinanthi	Jumlah janji temu medis tahunan yang dilakukan melalui jarak jauh per 100.000 penduduk					-		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati				
						Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit	Pengelolaan BLUD Rumah Sakit	-							138.224.312.552								
41	Misi 5	Smart Living	Kesehatan (health)	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi.	Usia Harapan Hidup.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	Kirim obat tanpa antri (Kinanthi)	Memudahkan pasien dalam pendaftaran dan mengurangi antrian	Jumlah janji temu medis tahunan yang dilakukan melalui jarak jauh per 100.000 penduduk					-		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati				
						Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit	Pengelolaan BLUD Rumah Sakit	-							131.642.202.432	138.224.312.554							
42	Misi 2	Smart Society	Interaksi masyarakat (community)	Mewujudkan lingkungan masyarakat yang humanis dan dinamis, agar terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, interaktif dan tanggap teknologi informasi.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM).	Badan Pelaksana Jaring Pengaman Sosial (Bapel JPS)	Kartu Pintar, Kartu Sehat, Kartu Ibu & Anak	Pendidikan, Kesehatan	Badan Pelaksana Jaring Pengaman Sosial (Bapel JPS) menjadi support system	Terbentuk lembaga desa yang fokus pada jaring pengaman sosial	Jumlah komputer, laptop, tablet atau perangkat pembelajaran digital lainnya yang tersedia per 1.000 siswa					543.956.500		ADD & PAD	Desa Panggungharjo				
						Sub Bidang Kesehatan	-	-						310.173.000	175.743.000								
43	Misi 2	Smart Society	Interaksi masyarakat (community)	Mewujudkan lingkungan masyarakat yang humanis dan dinamis, agar terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, interaktif dan tanggap teknologi informasi.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM).	Komunitas Budaya	Pembentukan Bumi Panggung	Keagamaan dan Kebudayaan	Lembaga Bumi Panggung	Terlaksananya pendataan komunitas seni di tingkat desa sehingga terwujud kemandirian desa untuk kesejahteraan	-					21.105.000		PAD	Desa Panggungharjo				
44	Misi 2	Smart Society	Interaksi masyarakat (community)	Mewujudkan lingkungan masyarakat yang humanis dan dinamis, agar terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, interaktif dan tanggap teknologi informasi.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM).	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bantul Integrated Siren System (BISS)	Informasi peringatan dini tsunami kepada warga melalui sirine	-					2.974.961.000		APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
						Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Peningkatan Kesiapsiagaan, Peringatan Dini Bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana						800.000.000	900.000.000								
45	Misi 2	Smart Society	Ekosistem belajar/pendidikan (learning)	Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan.	Angka Harapan Lama Sekolah.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Studio Mini Dikpora	Pemanfaatan studio untuk pembuatan media pembelajaran online	Jumlah komputer, laptop, tablet atau perangkat pembelajaran digital lainnya yang tersedia per 1.000 siswa					285.002.191		APBD	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga				
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							659.131.066								
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	-						955.350.000	1.050.885.000								
46	Misi 2	Smart Society	Keamanan masyarakat (security)	Terwujudnya penurunan risiko bencana.	Indeks risiko bencana.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bantul Integrated Siren System (BISS)	Informasi peringatan dini tsunami kepada warga melalui sirine	-							APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	-						955.350.000	1.050.885.000								
47	Misi 2	Smart Society	Keamanan masyarakat (security)	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat.	Persentase penanganan gangguan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Lapor Bantul	Masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan aspirasi dimanapun dan kapanpun sehingga aspirasi/ Keluhan yang masuk dapat tertangani dengan cepat karena arus data informasi yang real time.	Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan program yang ditujukan untuk menjembatani kesenjangan digital					1.309.327.700	1.639.360.514	APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika				
						Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	-				226.880.200	194.500.000	275.791.934	269.242.364								
48	Misi 2	Smart Society	Keamanan masyarakat (security)	Terwujudnya penurunan risiko bencana.	Indeks risiko bencana.	Pembinaan Kemasyarakatan	Keteriteraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Kalurahan	Peringatan Dini (e-Ngatin)	Pemanfaatan aplikasi untuk pemantauan ketinggian air sungai	Persentase area kota yang dicakup oleh kamera pengintai digital		80.950.000	92.480.000	615.218.600	242.241.000		-	Desa Srimulyo				
49	Misi 2	Smart Society	Keamanan masyarakat (security)	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat.	Persentase penanganan gangguan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	Pembinaan Perpustakaan	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PojoK Baca	Penyediaan sarana pojoK baca / rumah baca	Jumlah komputer, laptop, tablet atau perangkat pembelajaran digital lainnya yang tersedia per 1.000 siswa					-		APBD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				
						Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	-						314.740.231	330.477.243								
50	Misi 2	Smart Society	Keamanan masyarakat (security)	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat.	Persentase penanganan gangguan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	Gerakan Masyarakat Peduli Mengatasi Kemiskinan (Gerakan Madu Manis)	Pemberian bantuan sosial untuk pengentasan kemiskinan di Kapanewon Sewon	-					29.500.000		Masyarakat Peduli	Kapanewon Sewon				
						Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Pemberdayaan Lembaga Desa	-															
51	Misi 4	Smart Environment	Tata kelola energi (energy)	Penguatan upaya pencapaian ketersediaan energi.	Persentase tingkat ketersediaan energi.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Sistem Penjemuran Karya Santoso (SIPERKASA)	1. Terbanggunya Sistem Informasi 2. Pemanfaatan data statistik pertanian dari SIPERKASA 3. Sosialisasi sistem kepada kelompok tani	-					789.495.480		DID	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian				
						Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Balai Benih Pertanian (BPP)	-					1.432.543.500	1.493.334.000	1.568.000.000								
52	Misi 4	Smart Environment	Proteksi lingkungan (protection)	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas.	Indeks kualitas lingkungan hidup.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Gerakan Pelaksanaan Bersih Lingkungan (GLAS BELING)	Pelaksanaan kegiatan bersih lingkungan	-							APBD	Kapanewon Bambanglipuro				
						Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Pemberdayaan Lembaga Desa	-					33.750.000	83.037.400	90.259.350								
53	Misi 4	Smart Environment	Proteksi lingkungan (protection)	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas.	Indeks kualitas lingkungan hidup.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.	Tim Sapu Bersih Jam 8 Pagi (SABER 8 PAJANGAN)	Keterlibatan masyarakat	-							APBD	Kapanewon Pajangan				
						Program Pemberdayaan Masyarakat tingkat Kecamatan	Pemberdayaan Lembaga Desa	-						81.312.000	83.500.000								
54	Misi 4	Smart Environment	Pengelolaan sampah dan limbah (waste)	Terwujudnya pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional.	Persentase pemenuhan prasarana penanganan persampahan/TPS3R.	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jejaring Pengelolaan Sampah Mandiri (JPSM)	1. Kemampuan rumah tangga mengelola sampah rumah tangganya 2. Meningkatnya kuantitas rumah tangga yang mampu mengelola sampah	Persentase populasi kota yang memiliki pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan pemantauan individu terhadap jumlah sampah rumah tangga					2.611.820.600		APBD	Dinas Lingkungan Hidup				
						Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Kerjasama Pengelolaan Persampahan	-				1.588.000.000	1.571.123.250	1.841.477.000	1.690.721.694								
55	Misi 4	Smart Environment	Pengelolaan sampah dan limbah (waste)	Terwujudnya pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional.	Persentase pemenuhan prasarana penanganan persampahan/TPS3R.	Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	Pembangunan Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Pengelolaan Sampah Kalurahan	Srimulyo Clink	Fasilitasi klinik kebersihan lingkungan	1. Persentase jumlah total sampah di kota yang digunakan untuk energi. 2. Persentase dari jumlah total sampah plastik yang didaur ulang di kota		363.602.000	85.890.000	124.990.000	120.095.000		BUMDes	Desa Srimulyo				
56	Misi 1	Smart Governance	Birokrasi (bureaucracy)	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bantul yang berkualitas.	Indeks Reformasi Birokrasi	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik	Sistem Identifikasi Pengadaan (SIMDAN)	Proses identifikasi pengadaan barang dan jasa menjadi lebih efektif dan efisien	Jumlah warga kota per 100.000 penduduk yang terlibat dalam proses perencanaan					79.791.000		APBD	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa				
						Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Pelaksanaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	-				90.000.000	99.945.000	110.939.500	115.436.475								
57	Misi 2	Smart Society	Interaksi masyarakat (community)	Terwujudnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah; Meningkatkan Pembinaan Kebudayaan Daerah	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Directory Kebudayaan	Publikasi dokumentasi pelestarian warisan budaya/objek-objek kebudayaan di Kabupaten Bantul	Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan program yang ditujukan untuk menjembatani kesenjangan digital.					500.000.000		60.000.000	Dana Keistimewaan	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)			
58	Misi 4	Smart Environment	Proteksi lingkungan (protection)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks kualitas lingkungan hidup	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	RTH Ramah Anak	Peningkatan jumlah RTH	-					427.100.000,00	2.450.000.000,00	APBD	Dinas Lingkungan Hidup				

No	Misi Pembangunan	Dimensi Smart City	Sub Dimensi	Sasaran	Indikator Utama	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan (2021-2023)	Inovasi	Indikator Keberhasilan	Indikator SNI	Anggaran/Tahun Pelaksanaan					Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah		
												2018	2019	2020	2021	2022			2023	
59	Misi 4	Smart Environment	Pengelolaan sampah dan limbah (waste)	Tercapainya Pengelolaan Sampah	Persentase pemenuhan prasarana penanganan persampahan/TPS3R	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Bantul Bersama	Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	Persentase dari jumlah total sampah plastik yang didaur ulang di kota.					8.290.292,560	4.473.063,440	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	
								Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali		Peningkatan jumlah BUMKAL yang memiliki unit pengelolaan sampah										
								Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		Peningkatan jumlah Pengelola Sampah Mandiri/PSM (Bank Sampah, Shodaqoh Sampah dan sejenisnya) yang aktif										
								Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan												
								Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan												
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																				
Program Jangka Menengah																				
1	Misi 1	Smart Governance	Birokrasi (bureaucracy)	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bantul yang berkualitas.	Indeks Reformasi Birokrasi	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Pendokumentasian Produk hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jaring Dokumentasi	1. Produk hukum dapat tersimpan dalam data base JDIH 2. Memperlebar akses masyarakat terhadap produk hukum Kabupaten Bantul 3. Partisipasi aktif masyarakat terhadap Produk hukumnya	Jumlah warga kota per 100.000 penduduk yang terlibat dalam proses perencanaan					442.575.000	448.284.000	APBD	Bagian Hukum	
						Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Pembinaan Pengelolaan JDIH	-				22.200.000	19.350.000	21.000.000	23.500.000					
2	Misi 1	Smart Governance	Birokrasi (bureaucracy)	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bantul yang berkualitas.	Indeks Reformasi Birokrasi	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik	Sistem Identifikasi Pengadaan (SIMDAN)	Proses pengajuan pengadaan barang dan jasa menjadi lebih efektif dan efisien	Jumlah warga kota per 100.000 penduduk yang terlibat dalam proses perencanaan					79.791.000		APBD	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
						Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Pelaksanaan Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik	-				90.000.000	99.945.000	110.939.500	115.436.475					
3	Misi 1	Smart Governance	Birokrasi (bureaucracy)	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bantul yang berkualitas.	Indeks Reformasi Birokrasi	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Derah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan (SEMAKIN)	1. Melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan dan bantuan kemiskinan yang dilakukan oleh semua unit kerja pengelola bantuan kemiskinan berdasarkan manajemen data. 2. Aplikasi SEMAKIN dapat diakses oleh semua OPD untuk menyampaikan data dan informasi mengenai pengentasan kemiskinan secara realtime.	Jumlah warga kota per 100.000 penduduk yang terlibat dalam proses perencanaan					434.835.120		APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	-							143.623.000					
4	Misi 1	Smart Governance	Birokrasi (bureaucracy)	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bantul yang berkualitas.	Indeks Reformasi Birokrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sistem Informasi Kearsipan DPUPKP (SIKAPU)	1. Arsip penting akan terpelihara dan terjaga. 2. Arsip lebih mudah dan cepat diakses.	Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring				200.000.000	445.716.720		APBD	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
5	Misi 1	Smart Governance	Layanan publik (service)	Mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien yang didukung oleh sumber daya manusia dan Teknologi Informasi (IT) yang memadai.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Konsultasi dan Monitoring Pajak Daerah	Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (E-SPTPD)	Masyarakat diberikan kemudahan dan kecepatan dalam melaporkan SPTPD Pajak Daerah	Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring					10.302.989.220		APBD	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
						Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	-							548.281.000	575.160.000				
6	Misi 1	Smart Governance	Layanan publik (service)	Mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien yang didukung oleh sumber daya manusia dan Teknologi Informasi (IT) yang memadai.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Kelompok Kesenian	Sistem Pendaftaran Nomor Induk Kesenian secara Online (SIPESO)	Masyarakat dimudahkan dalam mengurus Nomor Induk Kesenian	Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring					205.939.620		APBD	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	
						Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pemutakhiran Data	-							70.045.180	73.508.287				
7	Misi 1	Smart Governance	Layanan publik (service)	Mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien yang didukung oleh sumber daya manusia dan Teknologi Informasi (IT) yang memadai.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Pengelolaan PIAK	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Data dan Penyajian Data Kependudukan	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	DUKCAPIL SMART	Jumlah layanan yang sudah dilakukan melalui Aplikasi Dukcapilsmart	Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring					138.161.220		APBD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
						Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Rapat dan Koordinasi Dalam Daerah	-							72.000.000	73.000.000				
8	Misi 1	Smart Governance	Layanan publik (service)	Mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien yang didukung oleh sumber daya manusia dan Teknologi Informasi (IT) yang memadai.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Surat Bantul (Surban)	Pengelolaan surat menyurat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul menjadi lebih efektif dan efisien	Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring					1.895.639.000		APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika	
						Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	-					5.273.346.600	5.522.894.300	5.812.394.298					
9	Misi 1	Smart Governance	Layanan publik (service)	Mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien yang didukung oleh sumber daya manusia dan Teknologi Informasi (IT) yang memadai.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Layanan Terpadu Investasi dan Perijinan (LANTIP)	Pemohon izin dapat terbantu dan dimudahkan melakukan proses perijinan melauai aplikasi LANTIP	Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring					102.785.120	96.800.000	APBD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
						Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	-					410.162.500	451.178.750	496.296.625					
10	Misi 1	Smart Governance	Layanan publik (service)	Mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien yang didukung oleh sumber daya manusia dan Teknologi Informasi (IT) yang memadai.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	Pembangunan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Kalurahan	Internet Sentuh Padukuhan	Masyarakat (anak usia sekolah dan pelaku ekonomi digital serta pemerintah kalurahan, padukuhan/RT) memiliki akses internet yang cukup	Persentase area kota yang dicakup oleh konektivitas internet yang disediakan oleh kota				199.846.780	274.225.000		APBKal	Desa Srimulyo	
11	Misi 1	Smart Governance	Layanan publik (service)	Mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien yang didukung oleh sumber daya manusia dan Teknologi Informasi (IT) yang memadai.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jetis One Stop Service (JETIS JOSS) Pelayanan Kecamatan Berbasis Online	Meningkatnya tingkat IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) dan pengajuan administrasi kependudukan dan administrasi lainnya yang terlayani	Jumlah kunjungan daring tahunan ke portal data terbuka per 100.000 penduduk					158.668.916		APBD	Kapanewon Jetis	
						Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-							0	-				
12	Misi 1	Smart Governance	Layanan publik (service)	Mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien yang didukung oleh sumber daya manusia dan Teknologi Informasi (IT) yang memadai.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Kepada Camat	Pelaksanaan Urusan yang Terkait dengan Non Perijinan	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Berhadiah	Masyarakat dapat melakukan pengurusan administrasi kependudukan secara mandiri	Jumlah kunjungan daring tahunan ke portal data terbuka per 100.000 penduduk					13.352.500		APBD	Kapanewon Pundong	
						Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-				25.300.000	20.272.000	21.179.768	22.238.756					
13	Misi 1	Smart Governance	Layanan publik (service)	Mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien yang didukung oleh sumber daya manusia dan Teknologi Informasi (IT) yang memadai.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Kepada Camat	Pelaksanaan Urusan yang Terkait dengan Non Perijinan	Layanan Antar KTP Sampai Rumah (Yanperum)	KTP yang telah selesai dapat didistribusikan ke masyarakat sesuai dengan alamat yang tercantum pada KTP	-							-	Kapanewon Pundong	
						Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-				25.300.000	20.272.000	21.179.768						

No	Misi Pembangunan	Dimensi Smart City	Sub Dimensi	Sasaran	Indikator Utama	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan (2021-2023)	Inovasi	Indikator Keberhasilan	Indikator SNI	Anggaran/Tahun Pelaksanaan						Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah
												2018	2019	2020	2021	2022	2023		
14	Misi 1	Smart Governance	Layanan publik (service)	Mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien yang didukung oleh sumber daya manusia dan Teknologi Informasi (IT) yang memadai.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pendaftaran ORMAS online aplikasi Si OLA (dari pusat)	1. Ormas lebih bergairah untuk mendaftarkan atau mendapat sertifikat SK dari pusat. 2. Tahun 2022, pendataan ulang terhadap ormas yang izimnya habis dilaksanakan lebih mudah, dan cepat	Jumlah kunjungan daring tahunan ke portal data terbuka per 100.000 penduduk					61.000.000		APBD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Program Pendidikan Politik Masyarakat	Pendaftaran, Pendataan, Verifikasi Ormas, Orsos, dan LSM	-								408.754.524			
15	Misi 1	Smart Governance	Layanan publik (service)	Mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien yang didukung oleh sumber daya manusia dan Teknologi Informasi (IT) yang memadai.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Penambahan Tempat / Cara Pembayaran Rekening Air	Kerjasama Dengan Penyedia Layanan Pembayaran	-	Pembayaran Tagihan PDAM Secara Online	Masyarakat dalam hal ini adalah pelanggan PDAM dimudahkan dalam melakukan pembayaran tagihan rekening air	Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring							Perumda Air Minum Bantul	PDAM
16	Misi 3	Smart Branding	Wajah tampilan kota (appearance)	Mewujudkan Kabupaten Bantul menjadi muka atau wajah DIY.	Jumlah kunjungan wisatawan.	Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah -	-	Landmark/ Identitas Bantul	Terbanggunya landmark Kabupaten Bantul	-	767.400.000	739.025.000					APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
17	Misi 3	Smart Branding	Daya saing bisnis (business)	Peningkatan daya saing Kabupaten Bantul yang bertumpu pada potensi unggulan yang dimiliki.	Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Sinkronisasi Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jajan Tonggo Nglaris Konco (JAGORIKO)	1. Jumlah UMKM yang mengikuti program Jagoriko 2. Peningkatan penjualan setelah mengikuti program Jagoriko	-					37.200.000		APBD	Kapanewon Sedayu
						Program Peningkatan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil Menengah	Penyelenggaraan promosi produk usaha Mikro Kecil Menengah	-											
18	Misi 3	Smart Branding	Pariwisata (tourism)	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul.	Cakupan peningkatan destinasi pariwisata.	Pengembangan Pemasaran	Pemasaran Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	Pemasaran Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	Sistem Informasi Managemen Pariwisata berbasis Statistik (SIMPATIK)	1. Terbanggunya Sistem Informasi 2. Pemanfaatan data statistik pariwisata dari SIMPATIK	-							APBD dan CSR	Dinas Pariwisata
						Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	-						2.168.596.329	2.277.026.146				
19	Misi 3	Smart Economy	Ekosistem industri (industry)	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas.	Capaian jaringan kabupaten kreatif.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar Sehat Bantul ber SNI (Pasar Imogiri Premium)	Status pasar SNI	Jumlah pendapatan tahunan yang dikumpulkan dari ekonomi berbagi sebagai persentase pendapatan sumber sendiri					5.059.168.213		APBD	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
						Program Penataan Pasar Rakyat	Pengembangan Pasar Rakyat Ber SNI	-						30.000.000	18.563.802				
20	Misi 3	Smart Economy	Ekosistem transaksi keuangan (transaction)	Terciptanya pengelolaan keuangan yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.	Opini BPK terhadap Laporan keuangan.	Penyelenggaraan Layanan Perbankan	Digitalisasi Layanan Perbankan	Layanan Eksternal	ATM Cardless & QRIS	Penyediaan layanan ATM cardless di Kantor Pusat Bank Bantul	Persentase pembayaran ke kota yang dibayar secara elektronik berdasarkan faktur ekonomi					150.000.000	-	Ops Bank	Bank Bantul
21	Misi 3	Smart Economy	Kesejahteraan masyarakat (welfare)	Turunnya jumlah masyarakat kurang mampu.	Tingkat kemiskinan.	Stabilisasi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam Satu Kabupaten	Pengawasan Perdagangan Terpadu (AWAS DAGADU)	Terjaganya stabilitas harga Bapak dan Barang Penting Lainnya	Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk					167.970.000		APBD	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
						Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	-					69.842.500	80.000.000	90.000.000				
22	Misi 3	Smart Economy	Kesejahteraan masyarakat (welfare)	Turunnya jumlah masyarakat kurang mampu.	Tingkat kemiskinan.	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Pandak Expo	Terselenggaranya expo	Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk							APBD	Kapanewon Pandak
						Program Pemberdayaan Masyarakat	Bantul Ekspo dan Karnaval	-						31.750.000	-	-			
23	Misi 5	Smart Living	Harmonisasi tata ruang (harmony)	Mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak dan berkelanjutan.	Indeks pembangunan infrastruktur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Garap lahan masyarakat sejahtera (Galamatra)	1. Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam program GALAMATRA 2. Jumlah lahan terbengkalai yang telah tergarap dan beralih menjadi lebih bermanfaat	-							APBD	Kapanewon Jetis
						Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Pemberdayaanh lembaga desa	-				197.362.500	213.470.000						
24	Misi 5	Smart Living	Harmonisasi tata ruang (harmony)	Mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak dan berkelanjutan.	Indeks pembangunan infrastruktur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Membawa Tas Sendiri (NUABA ASRI)	Peningkatan kesadaran penggunaan tas belanja	-					85.391.200		-	Kapanewon Pundong
						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi, dan Konsultasi	-								88.730.001			
25	Misi 5	Smart Living	Kesehatan (health)	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi.	Usia Harapan Hidup.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Sistem Informasi KLB	1. Adanya notifikasi KLB di suatu wilayah 2. Nakes bisa melakukan analisis penyakit dalam satu wilayah	Jumlah janji temu medis tahunan yang dilakukan melalui jarak jauh per 100.000 penduduk					21.022.955.117		APBD	Dinas Kesehatan
						Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	-						97.570.000	107.327.000				
26	Misi 5	Smart Living	Kesehatan (health)	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi.	Usia Harapan Hidup.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Whatsapp Tanpa Antri (WA-Tantri)	Mempermudah pelayanan perijinan di Dinas Kesehatan	Jumlah janji temu medis tahunan yang dilakukan melalui jarak jauh per 100.000 penduduk					21.022.955.117		APBD Murni	Dinas Kesehatan
						Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	-				78.113.100.802	85.982.000.175	89.832.221.210	94.323.832.270				
27	Misi 5	Smart Living	Kesehatan (health)	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi.	Usia Harapan Hidup.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Cakupan Penemuan Kasus TBC	Gerakan Jaring dan Obati Penderita Tuberculosis (Gropyok TBC)	Meningkatnya penemuan penderita TBC baru, dan peningkatan jumlah penderita TBC yang sembuh	Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan					21.022.955.117		BOK Swadaya Masyarakat, Anggaran Dana Desa	Dinas Kesehatan
						Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Penangulangan Penyakit Menular	-				367.840.000	459.831.000	473.334.000	496.163.651				
28	Misi 5	Smart Living	Kesehatan (health)	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi.	Usia Harapan Hidup.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sistem Informasi Manajemen E-Logistik (SIM-ELOG)	Implementasi Sistem E-LOG sampai ke Puskesmas	Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan								APBD	Dinas Kesehatan
						Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan	-						97.570.000	107.327.000				
29	Misi 5	Smart Living	Kesehatan (health)	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi.	Usia Harapan Hidup.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	KUDA (Kendaraan Untuk Daurat Warga)	100% masyarakat yang mengalami kegawatan kesehatan mengakses layanan Kesehatan dengan armada yang mudah dan cepat.	-					21.022.955.117		BOK Swadaya Masyarakat, Anggaran Dana Desa	Dinas Kesehatan
						Program Upaya Kesehatan Masyarakat		-								94.323.832.270			
30	Misi 5	Smart Living	Kesehatan (health)	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi.	Usia Harapan Hidup.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	Gerakan Peduli Masyarakat Sehat Jiwo (Gelimas Jiwo)	Peningkatan penanganan ODGJ dan tercapainya bebas pasung bagi pasien ODGJ sebelum 2020	Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan							BOK dan POKIR	Dinas Kesehatan
						Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	-					85.982.000.175	89.832.221.210	94.323.832.270				
31	Misi 5	Smart Living	Kesehatan (health)	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi.	Usia Harapan Hidup.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	Pasien Jiwa Sehat Sejahtera Jenius Olah Sambah (SIJAWARA JOS)	Pelaksanaan terapi pasien jiwa	Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan								Dinas Kesehatan
						Program Peningkatan Pencegahan Penyakit Tidak Menular	Pencegahan dan penangulangan penyakit tidak menular	-					1.407.225.000	1.470.239.669	1.543.751.653				
32	Misi 5	Smart Living	Kesehatan (health)	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi.	Usia Harapan Hidup.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Sistem Pendaftaran Pasien Anjungan Pendaftaran Mandiri (APM)	Pemanfaatan APM sebagai media pendaftaran pasien	Jumlah janji temu medis tahunan yang dilakukan melalui jarak jauh per 100.000 penduduk							Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati
						Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit	Pengelolaan BLUD Rumah Sakit	-					126.000.000.000	131.642.202.431	138.224.312.552				
33	Misi 5	Smart Living	Kesehatan (health)	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi.	Usia Harapan Hidup.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	-	Sehat Ekonomi Meningkat KaRo Jamu (SEROJA)	1. Derajat kesehatan masyarakat meningkat 2. Status ekonomi masyarakat khususnya kelompok binaan SEROJA meningkat 3. Budaya minum/konsumsi jamu meningkat 4. Produksi pertanian tanaman obat sebagai bahan baku jamu meningkat	-					600.000.000	4.044.050.000	Dana Keistimewaan	Dinas Kesehatan
						-	-	-								473.512.300			
34	Misi 2	Smart Society	Interaksi masyarakat (community)	Mewujudkan lingkungan masyarakat yang humanis dan dinamis, agar terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, interaktif dan tanggap teknologi informasi.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM).	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	Germas Kencana (Gerakan Masyarakat Sadar Keluarga Berencana)	Peningkatan partisipasi Program KB di Kapanewon Kasihan	-					65.626.917		APBD Kabupaten Bantul dan APBKalurahan	Kapanewon Kasihan
						Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	-	-								21.940.368			

No	Misi Pembangunan	Dimensi Smart City	Sub Dimensi	Sasaran	Indikator Utama	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan (2021-2023)	Inovasi	Indikator Keberhasilan	Indikator SNI	Anggaran/Tahun Pelaksanaan					Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah	
												2018	2019	2020	2021	2022			2023
35	Misi 2	Smart Society	Interaksi masyarakat (community)	Mewujudkan lingkungan masyarakat yang humanis dan dinamis, agar terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, interaktif dan tanggap teknologi informasi.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM).	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Pemberdayaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	- -	Gerakan Mengatasi kemiskinan dan Kesenjangan (Gerimis Senja)	Terselenggaranya program bantuan sosial untuk masyarakat miskin	- -				87.242.500		Pengusaha dan CSR dari lembaga keuangan di Pleret	Kapanewon Pleret	
36	Misi 2	Smart Society	Ekosistem belajar/pendidikan (learning)	Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan.	Angka Harapan Lama Sekolah.	Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan dasar	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	E-Rapot (aplikasi dari Kemendikbud, Disdikpora hanya bisa read only) yang akan diintegrasikan dengan SIMPONI	Implementasi E-Rapot di seluruh SMP se-Kabupaten Bantul	Jumlah komputer, laptop, tablet atau perangkat pembelajaran digital lainnya yang tersedia per 1.000 siswa				-	-	APBD/BOSDA APBN/BOSNAS	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
37	Misi 2	Smart Society	Ekosistem belajar/pendidikan (learning)	Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan.	Angka Harapan Lama Sekolah.	Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	E-Learning	Terlaksananya kegiatan pembelajaran secara daring (e learning)	Jumlah komputer, laptop, tablet atau perangkat pembelajaran digital lainnya yang tersedia per 1.000 siswa				-	-	APBD/BOSDA APBN/BOSNAS	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
38	Misi 2	Smart Society	Ekosistem belajar/pendidikan (learning)	Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan.	Angka Harapan Lama Sekolah.	Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan dasar	-	E-Learning (dari CSR) 4 SMA dan 1 SMK	1. Terbangunnya sistem informasi pendidikan 2. Terlaksananya kegiatan pembelajaran secara daring (e learning)	Jumlah komputer, laptop, tablet atau perangkat pembelajaran digital lainnya yang tersedia per 1.000 siswa				-	-	Dana CSR Astra	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
39	Misi 2	Smart Society	Ekosistem belajar/pendidikan (learning)	Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan.	Angka Harapan Lama Sekolah.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya -	Pengembangan Budaya Baca (Aplikasi BANTUL PINTER)	Layanan perpustakaan berbasis online	Jumlah komputer, laptop, tablet atau perangkat pembelajaran digital lainnya yang tersedia per 1.000 siswa				336.105.884		APBD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
													50.000.000	52.500.000	55.125.000				
40	Misi 4	Smart Environment	Proteksi lingkungan (protection)	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas.	Indeks kualitas lingkungan hidup.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa. -	Padi Organik ANSAMBEL (Air Sendang Ngembel)	Pembinaan pupuk organik	- -					52.572.000		APBD	Kapanewon Pajangan
																-			
41	Misi 4	Smart Environment	Pengelolaan sampah dan limbah (waste)	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas.	Indeks kualitas lingkungan hidup.	Pengelolaan Persampahan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten -	Gost Sampah (Gropok Sampah, OTT Sampah, Saber Sampah, dan Tindak Sampah)	1. Jumlah timbusampah liar, 2. Jumlah pelaksanaan OT Sampah 3. Jumlah pelanggaran pembuangan sampah ilegal	Persentase populasi kota yang memiliki pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan pemantauan individu terhadap jumlah sampah rumah tangga	21.763.200.000	8.531.488.250	8.913.523.042	9.359.199.194	2.611.820.600		APBD	Dinas Lingkungan Hidup
Program Jangka Panjang																			
1	Misi 1	Smart Governance	Birokrasi (bureaucracy)	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bantul yang berkualitas.	Indeks Reformasi Birokrasi	Pengelolaan Arsip Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten Kota	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis, Akusisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis -	E-Arsip - GETAR BAHANA (Gerakan Tertip Arsip Bantul Harmoni dan Akuntabel)	Meningkatnya pelayanan kearsipan untuk masyarakat desa tentang arsip letter c serta peningkatan pemahaman pengelolaan arsip bagi arsiparis dan petugas arsip di seluruh OPD dalam lingkup jajaran Pemerintah Kabupaten Bantul	Jumlah warga kota per 100.000 penduduk yang terlibat dalam proses perencanaan	323.455.000	462.182.121	485.291.227	509.555.788	215.832.480		APBD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Misi 1	Smart Governance	Birokrasi (bureaucracy)	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bantul yang berkualitas.	Indeks Reformasi Birokrasi	Pengelolaan Arsip Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis -	PEPES ARTIS (Penilaian dan Penyusutan Arsip untuk Instansi)	1. Jumlah masyarakat (termasuk ASN) yang terlibat dalam program GETAR BAHANA 2. Efisiensi untuk anggaran pemeliharaan arsip serta meningkatnya nilai kearsipan bagi OPD dalam pengawasan internal kearsipan	Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	25.903.000	50.419.012	50.969.459	53.517.932	146.160.480		APBD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	Misi 1	Smart Governance	Birokrasi (bureaucracy)	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bantul yang berkualitas.	Indeks Reformasi Birokrasi	Penyelenggaraan Pengawasan Kinerja Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Penyelenggaraan Pengawasan Internal Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala -	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah -	e-Audit	Mempermudah pemeriksaan pengawasan menggunakan aplikasi	Jumlah warga kota per 100.000 penduduk yang terlibat dalam proses perencanaan					1.081.807.656		APBD	Inspektorat
4	Misi 1	Smart Governance	Birokrasi (bureaucracy)	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bantul yang berkualitas.	Indeks Reformasi Birokrasi	Program Penunjang Pemerintah Daerah Program Peningkatan Sistem Manajemen dan Prosedure Birokrasi Pemerintah	Penataan Organisasi Pengukuran Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana -	E-Survei IKM Terintegrasi	Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat	Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring		30.241.700	31.352.500	30.328.589	240.109.013		APBD	Bagian Organisasi
5	Misi 1	Smart Governance	Birokrasi (bureaucracy)	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bantul yang berkualitas.	Indeks Reformasi Birokrasi	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Program Penyajian Data Statistik Daerah	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah -	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah -	Portal Satu Data	Perbaikan tata kelola data sehingga terwujud transparansi dan akuntabilitas pemerintah Kabupaten Bantul, serta mendukung pembangunan daerah	Jumlah warga kota per 100.000 penduduk yang terlibat dalam proses perencanaan	-	0	200.935.000	221.028.500	176.400.000	170.665.000	APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika
6	Misi 1	Smart Governance	Birokrasi (bureaucracy)	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bantul yang berkualitas.	Indeks Reformasi Birokrasi	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Program Penyajian Data Statistik Daerah	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah -	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah -	Portal Geospasial/Geoportal	Perbaikan tata kelola data sehingga terwujud transparansi dan akuntabilitas pemerintah Kabupaten Bantul, serta mendukung pembangunan daerah	Jumlah warga kota per 100.000 penduduk yang terlibat dalam proses perencanaan		-	200.935.000	221.028.500	176.400.000	170.665.000	APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika
7	Misi 1	Smart Governance	Layanan publik (service)	Mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien yang didukung oleh sumber daya manusia dan Teknologi Informasi (TI) yang memadai.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Penatagunaan Tanah Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang -	Konsolidasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kab/Kota -	Konsolidasi Tanah	Output sertifikat jalan								APBD	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
8	Misi 1	Smart Governance	Layanan publik (service)	Mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien yang didukung oleh sumber daya manusia dan Teknologi Informasi (TI) yang memadai.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan dasar	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Sistem Informasi Pendidikan dan Olahraga Terkini (SIMPONI)	Masyarakat dan stakeholder pengguna pendidikan mendapatkan informasi yang valid tentang sekolah dan profil warga sekolah termasuk kegiatan terkini yang dilaksanakan	Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring				-	-	APBD	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
9	Misi 1	Smart Governance	Layanan publik (service)	Mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien yang didukung oleh sumber daya manusia dan Teknologi Informasi (TI) yang memadai.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penagihan Pajak Daerah	Layanan Informasi Pajak Daerah Kabupaten Bantul (LAPAK BANTUL)	1. Masyarakat mengetahui informasi objek pajak, data riwayat pembayaran, tagihan PBB dengan mudah dan jadwal mobil pelayanan pajak keliling yang dapat diakses oleh wajib pajak 2. Masyarakat dapat melihat data obyek pajak, tagihan dan histori pembayaran PBB-P2, serta status layanan BPHTB secara mandiri melalui aplikasi tanpa perlu datang ke kantor Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring		6.877.198	10.631.625	11.163.206	10.302.989.220	12.193.391.500	APBD	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
10	Misi 1	Smart Governance	Layanan publik (service)	Mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien yang didukung oleh sumber daya manusia dan Teknologi Informasi (TI) yang memadai.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Bantulpedia	1. Terbangunnya Sistem Informasi 2. Pemanfaatan Sistem Informasi Bantulpedia	Jumlah kunjungan daring tahunan ke portal data terbuka per 100.000 penduduk				-	1.895.639.000		APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika
11	Misi 1	Smart Governance	Layanan publik (service)	Mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien yang didukung oleh sumber daya manusia dan Teknologi Informasi (TI) yang memadai.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Bantul Hub	1. Terbangunannya Sistem 2. Pemanfaatan Bantulhub	Rata-rata waktu henti (downtime) infrastruktur teknologi informasi (TI) kota								Dinas Komunikasi dan Informatika
12	Misi 1	Smart Governance	Layanan publik (service)	Mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien yang didukung oleh sumber daya manusia dan Teknologi Informasi (TI) yang memadai.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Program Aplikasi Informatika Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi -	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah -	Jalur Utama Fiber Optic (Jalu Fitik)	Layanan publik berbasis online dapat diakses dengan koneksi yang cepat dan handal	Persentase area kota yang dicakup oleh konektivitas internet yang disediakan oleh kota				1.895.639.000	1.957.356.308	APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika	
													5.145.833.800	5.186.316.800	5.427.161.300	5.707.087.999			
13	Misi 1	Smart Governance	Layanan publik (service)	Mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien yang didukung oleh sumber daya manusia dan Teknologi Informasi (TI) yang memadai.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Peningkatan Pelayanan Masyarakat -	- -	Jetis Rumah Data Lengkap (JETRUDAL)	1. Jumlah yang datang yang di input ke website Kecamatan Jetis 2. Jumlah masyarakat yang mengakses website Kecamatan Jetis					158.668.916		APBD	Kapanewon Jetis	
														3.000.000	0	-			
14	Misi 3	Smart Economy	Ekosistem industri (industry)	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas.	Capaian jaringan kabupaten kreatif.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Pengembangan Kewirausahaan -	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro -	Sistem Informasi Data Koperasi UKM dan Perindustrian (SIDAKUI)	Jumlah UMKM yang terdaftar dalam aplikasi SIDAKUI	Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk					542.859.532		APBD	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No	Misi Pembangunan	Dimensi Smart City	Sub Dimensi	Sasaran	Indikator Utama	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan (2021-2023)	Inovasi	Indikator Keberhasilan	Indikator SNI	Anggaran/Tahun Pelaksanaan						Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah
												2018	2019	2020	2021	2022	2023		
15	Misi 3	Smart Economy	Ekosistem transaksi keuangan (transaction)	Terciptanya pengelolaan keuangan yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.	Opini BPK terhadap laporan keuangan.	Stabilisasi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam Satu Kabupaten	Sistem Informasi Harga Bahan Pokok (Aplikasi BAPOK)	Harga pokok yang dapat diakses masyarakat secara mudah	-					167.970.000	APBD	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
						Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk	-						80.000.000	90.000.000				
16	Misi 3	Smart Economy	Ekosistem transaksi keuangan (transaction)	Terciptanya pengelolaan keuangan yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.	Opini BPK terhadap laporan keuangan.	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	Bantul Online Shop (BOS)	Banyaknya transaksi UMKM maupun pedagang pasar melalui aplikasi BOS	-				324.000.000	1.895.639.000	1.957.356.308	CSR Bank BPD DIY	Dinas Komunikasi dan Informatika
17	Misi 3	Smart Economy	Kesejahteraan masyarakat (welfare)	Turunnya jumlah masyarakat kurang mampu.	Tingkat kemiskinan.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Penataan PKL Berbasis Kawasan (PEGANG KAKI BESAN)	Kawasan PKL yang terkumpul dalam suatu lokasi sehingga lebih rapi dan tertata	Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk					1.011.755.500	APBD	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
						Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Penataan tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan	-					832.975.000	633.244.119	665.254.058				
18	Misi 3	Smart Economy	Kesejahteraan masyarakat (welfare)	Turunnya jumlah masyarakat kurang mampu.	Tingkat kemiskinan.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jajan Sedulur Nukoni Tangga (Janur Kota)	Peningkatan ekonomi lokal	Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk						-	Kapanewon Pundong	
						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi, dan Konsultasi	-						84.445.000	88.730.000				
19	Misi 5	Smart Living	Kesehatan (health)	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi.	Usia Harapan Hidup.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Pasukan Anak Sekolah Pembasmi Jentik (PASBATIK)	1. Meningkatnya Angka Bebas Jentik /ABJ 2. Meningkatnya Partisipasi Siswa 3. Berkurangnya angka kesakitan akibat nyamuk	Persentase populasi kota yang memiliki akses ke sistem peringatan publik langsung (real-time) untuk saran kualitas udara dan air						APBD	Kapanewon Jetis	
						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	-				197.362.501							
20	Misi 5	Smart Living	Kesehatan (health)	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi.	Usia Harapan Hidup.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	Rekam Medik Elektronik	Implementasi RME di semua layanan RS Panembahan Senopati	Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan						Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati	
						Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit	Pengelolaan BLUD Rumah Sakit	-						131.642.202.432	138.224.312.553				
21	Misi 2	Smart Society	Interaksi masyarakat (community)	Mewujudkan lingkungan masyarakat yang humanis dan dinamis, agar terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, interaktif dan tanggap teknologi informasi.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM).	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	BERBAGI (BERSama Bangun sinerGi) Melalui BUNGA DERMAYA (Menyambungkan Dermawan dengan Masyarakat Tidak Berdaya)	Pemberian bantuan sosial bagi warga masyarakat di Kecamatan Bantul	-					60.000.000	DAU	Kapanewon Bantul	
						Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	-	-							46.000.000				
22	Misi 2	Smart Society	Interaksi masyarakat (community)	Mewujudkan lingkungan masyarakat yang humanis dan dinamis, agar terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, interaktif dan tanggap teknologi informasi.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM).	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Dlingo Peduli Perempuan dan Anak (DLINGO PENAK)	Sosialisasi dan edukasi sebagai upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di bawah umur	-					88.367.500	APBD	Kapanewon Dlingo	
						Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Pembinaan Organisasi Perempuan	-											
23	Misi 2	Smart Society	Interaksi masyarakat (community)	Mewujudkan lingkungan masyarakat yang humanis dan dinamis, agar terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, interaktif dan tanggap teknologi informasi.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM).	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Sosialisasi	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Non Perijinan	Pembuatan Sistem Informasi Pengurangan Angka Kemiskinan (SIPENGKUH)	Pembuatan aplikasi untuk penanganan kemiskinan berbasis usaha	-					30.400.000	APBD	Dinas Sosial	
						Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Pendampingan Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan	-						13.947.805	3.600.000				
24	Misi 2	Smart Society	Ekosistem belajar/pendidikan (learning)	Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan.	Angka Harapan Lama Sekolah.	Program Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Pelaporan Singkat Emergency dan Kebencanaan (Aplikasi PASEBAN)	Pemanfaatan aplikasi untuk penanganan kebencanaan	-					20.475.000	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
						Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Kebencanaan	Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan	-					75.000.000	100.000.000	100.000.000				
25	Misi 2	Smart Society	Ekosistem belajar/pendidikan (learning)	Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan.	Angka Harapan Lama Sekolah.	Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Bantul Sinau	Pemanfaatan Aplikasi Bantul Sinau untuk penilaian hasil belajar siswa secara mandiri berbasis online	Jumlah komputer, laptop, tablet atau perangkat pembelajaran digital lainnya yang tersedia per 1.000 siswa				350.000.000	800.000.000		APBD	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
26	Misi 2	Smart Society	Ekosistem belajar/pendidikan (learning)	Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan.	Angka Harapan Lama Sekolah.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)	Pendataan dan pengelolaan fakir miskin serta penanganan pmks	-					4.074.365.740	APBD	Dinas Sosial	
						Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Penyusunan Data dan Analisis Permasalahan PMKS	-											
27	Misi 2	Smart Society	Ekosistem belajar/pendidikan (learning)	Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan.	Angka Harapan Lama Sekolah.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Penguatan Kapasitas Sumberdaya Komunikasi Publik	Ruang Milenial Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat yang memanfaatkan media digital dalam penyebarluasan informasi pemerintah	Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan program yang ditujukan untuk menjembatani kesenjangan digital					362.014.200	APBD dan Danais	Dinas Komunikasi dan Informatika	
						Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi Dan Komunikasi	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	-					901.765.000	942.145.482	989.252.756				
28	Misi 2	Smart Society	Keamanan masyarakat (security)	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat.	Persentase penanganan gangguan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA Hotline 24 Jam)	Penanggulan korban kekerasan anak dan perempuan lebih cepat dan tertangani	-						DAK dan APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul	
						Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Pendampingan Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	-				475.200.000	474.499.000	495.746.773	520.534.11				
29	Misi 2	Smart Society	Keamanan masyarakat (security)	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat.	Persentase penanganan gangguan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Aplikasi SIAP KESOS (SIAP Kesejahteraan Sosial)	Tersedianya data PMKS dan PSKS yang lengkap dan akurat	Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan program yang ditujukan untuk menjembatani kesenjangan digital					8.878.751.920	APBD	Dinas Sosial	
						Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana, dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS	-							2.291.200.446				

BAB 06

BANTUL **SMART AREA**

BAB VI

BANTUL SMART AREA

Kabupaten Bantul memiliki semboyan “Projotamansari” menggambarkan motivasi, semangat, dan tujuan dari karakteristik di wilayah Kabupaten Bantul dan semboyan ini termuat dalam visi RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2005-2025 yaitu “Bantul Projotamansari Sejahtera, Demokratis, dan Agamis”. Kata “Projotamansari” dimaknai sebagai etos kerja yang melandasi pola sikap, pola tindak, dan pola pikir seluruh masyarakat Kabupaten Bantul beserta aparaturnya Pemerintah Daerah. Semboyan “Projotamansari” dapat menjadi *branding* wilayah sebagai upaya penguatan ciri atau karakteristik wilayah Bantul itu sendiri. Lebih jauh, inovasi *Smart City* yang telah disusun sebelumnya selanjutnya dianalisis dan dipetakan sesuai semboyan “Projotamansari”. Pemetaan area inovasi dengan pengelompokan berdasarkan semboyan “Projotamansari” kemudian disebut dengan *Bantul Smart Area*. Adapun beberapa contoh inovasi yang merefleksikan Semboyan “Projotamansari” dalam *Bantul Smart Area* dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. PRODUKTIF

Semua potensi Kabupaten Bantul mampu memproduksi sehingga dapat memberikan andil terhadap pembangunan daerah. Dalam dimensi *Smart City*, produktif dapat dimasukkan kedalam dimensi *Smart Society* dan *Smart Economy* diwakilkan dalam inovasi, antara lain: Bapel JPS, Ruang Milenial Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Bantul *Online Shop*, Kampung UKM Digital, dan Studio Mini Dikpora.

2. PROFESIONAL

Hasil kerja yang berkualitas dan efisien baik dari sisi penggunaan dana, sarana, tenaga serta waktu yang diperlukan. Profesional dapat diartikan sebagai berbagai bentuk program kegiatan berbasis TIK yang mampu memangkas waktu yang diberikan dalam memberikan atau mengakses layanan, mempermudah layanan, serta menghemat biaya pengeluaran yang diperlukan. Profesional termasuk termasuk dalam dimensi *Smart Governance*, *Smart Branding*, *Smart Economy*, dan *Smart Society*. Adapun beberapa inovasi yang terwakilkan dalam aspek profesional, antara lain: Dukcapil *Smart*, Bantul Hub, Bantulpedia, Portal Satu Data, dan *e-Retribusi*.

3. IJO ROYO-ROYO

Optimalisasi penggunaan lahan di Kabupaten Bantul sebagai kawasan agronomi yang tangguh dalam menciptakan suasana yang rindang. Oleh

karena itu, ijo royo-royo termasuk dalam dimensi *Smart Living* dan *Smart Environment* dalam *Smart City* yang diwakilkan dalam inovasi, antara lain: Garap lahan masyarakat sejahtera (Galamatra), ELODEA, SIPERKASA (Sistem Penjemuran Karya Santoso), Padi Organik ANSAMBEL (Air Sendang Ngembel) dan Jejaring Pengelolaan Sampah Mandiri (JPSM).

4. TERTIB

Terwujudnya kehidupan pemerintah dan kemasyarakatan yang tertib dan berpedoman pada sistem ketentuan hukum / perundang-undangan. Dalam dimensi *Smart City*, tertib termasuk dalam dimensi *Smart Governance*, *Smart Society*, dan *Smart Economy*. Adapun beberapa inovasi yang terwakilkan dalam aspek tertib, antara lain: JDIH, e-Audit, Aplikasi PASEBAN, PEGANG KAKI BESAN (Penataan PKL Berbasis Kawasan), dan AWAS DAGADU (Pengawasan Perdagangan Terpadu).

5. AMAN

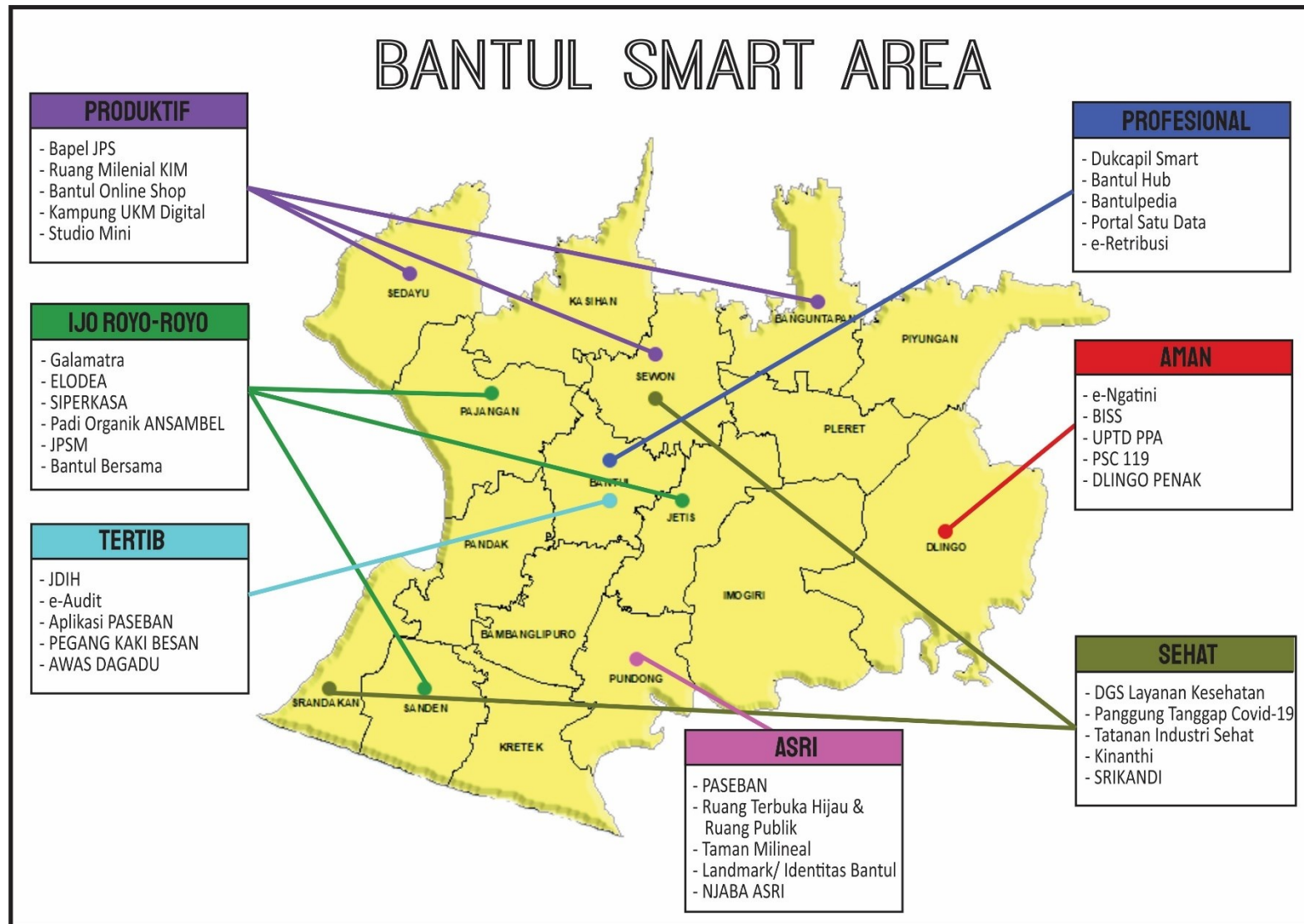
Terwujudnya tertib pemerintah dan tertib kemasyarakatan akan sangat membantu terwujudnya keamanan dan ketentraman masyarakat dalam menjamin stabilitas Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, sama dengan sebelumnya, aman termasuk dalam dimensi *Smart Society* dan *Smart Living* yang diwakilkan dengan inovasi, antara lain: e-Ngatini (Peringatan Dini), Bantul *Integrated Siren System* (BISS), UPTD PPA *Hotline* 24 Jam, PSC 119, dan DLINGO PENAK (Kecamatan Dlingo Peduli Perempuan dan Anak).

6. SEHAT

Lingkungan hidup yang tertib dan terjaga mampu menjamin kesehatan jasmani dan rohani bagi masyarakat/manusia yang menghuninya. Sehat termasuk termasuk dalam dimensi *Smart Living*. Adapun beberapa inovasi yang terwakilkan dalam aspek sehat, antara lain: DGS Layanan Kesehatan, Panggung Tanggap Covid-19, Tatanan Industri Sehat, Kinanthi (Kirim Obat tanpa Antri), dan SRIKANDI.

7. ASRI

Upaya pengaturan tata ruang di desa dan di kota dapat serasi, selaras, seimbang dan *sustainable* dengan kegiatan-kegiatan manusia yang menghuninya. Oleh karena itu, asri dalam dimensi *Smart City* termasuk pada dimensi *Smart Economy*, *Smart Living*, *Smart Branding*, dan *Smart Environment* yang diwakilkan dengan inovasi, antara lain: PASEBAN (Pasar Sehat Bantul), Ruang terbuka hijau dan ruang publik, Taman Milineal, *Landmark*/Identitas Bantul, dan NJABA ASRI (Belanja Membawa Tas Sendiri).



Gambar 6. 1 Peta Bantul *Smart Area*

Sumber: Hasil analisis, 2021

Adapun secara keseluruhan hasil pemetaan inovasi *Smart City* dengan semboyan “Projotamansari” antara lain sebagai berikut:

Tabel 6. 1 Hasil Pemetaan Beberapa Semboyan Projotamansari Dengan Inovasi *Smart City*

Projotamansari	Dimensi <i>Smart City</i>	Inovasi <i>Smart City</i>
Aman	<i>Smart Living</i>	SIGAP (Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Publik) – <i>Public Safety center</i> (PSC) 119
	<i>Smart Society</i>	<i>BANTUL INTEGRATED SIREN SYSTEM</i> (BISS)
	<i>Smart Society</i>	DLINGO PENAK (Kecamatan Dlingo Peduli Perempuan dan Anak)
	<i>Smart Society</i>	<i>e-Ngatini</i> (Peringatan Dini)
	<i>Smart Society</i>	SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu)
	<i>Smart Society</i>	UPTD PPA, <i>Hotline</i> 24 Jam
Asri	<i>Smart Branding</i>	<i>Landmark</i> / Identitas Bantul
	<i>Smart Economy</i>	Pasar Sehat Bantul ber SNI (Pasar Imogiri Premium)
	<i>Smart Economy</i>	PASEBAN (Pasar Sehat Bantul)
	<i>Smart Living</i>	NJABA ASRI (Belanja Membawa Tas Sendiri)
	<i>Smart Environment</i>	RTH Ramah Anak
Ijo Royo-Royo	<i>Smart Environment</i>	GELAS BELING (Gerakan Pelaksanaan Bersih Lingkungan)
	<i>Smart Environment</i>	Jejaring Pengelolaan Sampah Mandiri (JPSM)
	<i>Smart Environment</i>	Padi Organik ANSAMBEL (Air Sendang Ngembel)
	<i>Smart Environment</i>	SIPERKASA (Sistem Penjemuran Karya Santoso)
	<i>Smart Environment</i>	Tim SABER 8 PAJANGAN (Sapu Bersih Jam 8 Pagi)
	<i>Smart Environment</i>	Bantul Bersama
	<i>Smart Living</i>	ELODEA (pEmanfaatan Lahan kOsong Di kantor kEcamatan sAnden)

Projotamansari	Dimensi <i>Smart City</i>	Inovasi <i>Smart City</i>
	<i>Smart Living</i>	Garap lahan masyarakat sejahtera (Galamatra)
Produktif	<i>Smart Society</i>	Bantul Sinau
	<i>Smart Society</i>	Bapel JPS menjadi <i>support system</i>
	<i>Smart Society</i>	<i>E-Learning</i>
	<i>Smart Society</i>	<i>E-Learning</i> (dr CSR) 4 sekolah 1 SMK
	<i>Smart Society</i>	<i>E-Raport</i> (dr kemendikbud, dikpora <i>read only</i>) nanti akan diintegrasikan dengan simponi
	<i>Smart Society</i>	Pengembangan Budaya Baca (Aplikasi BANTUL PINTER)
	<i>Smart Society</i>	Pojok Baca
	<i>Smart Society</i>	Ruang Milenial Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
	<i>Smart Society</i>	Studio Mini Dikpora
	<i>Smart Economy</i>	Bantul <i>Online Shop</i>
Profesional	<i>Smart Branding</i>	Jelajah Bantul
	<i>Smart Branding</i>	SIMPATIK (Sistem Informasi Manajemen Pariwisata berbasis Statistik)
	<i>Smart Branding</i>	TIC (<i>Tourism Information Center</i>)
	<i>Smart Economy</i>	Aplikasi BAPOK
	<i>Smart Economy</i>	Aplikasi pasardesa.id
	<i>Smart Economy</i>	Aplikasi SIDAKUI
	<i>Smart Economy</i>	ATM <i>Cardless</i>
	<i>Smart Economy</i>	SMS <i>Notification</i>
	<i>Smart Governance</i>	Aksi Simpati (Akta Kematian Sehari Jadi)
	<i>Smart Governance</i>	Bantul Hub
	<i>Smart Governance</i>	Bantulpedia
	<i>Smart Governance</i>	DUKCAPIL SMART
	<i>Smart Governance</i>	<i>Early Warning Systems</i> pada Sistem Pendampingan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan oleh Rumpun Bidang

Projotamansari	Dimensi <i>Smart City</i>	Inovasi <i>Smart City</i>
		terhadap Perangkat Daerah di Bappeda Kabupaten Bantul
Profesional	<i>Smart Governance</i>	e-LASTRI (Layanan Administrasi Tanpa Antri)
	<i>Smart Governance</i>	E-Retribusi Pasar
	<i>Smart Governance</i>	E-Retribusi Pelayanan Persampahan
	<i>Smart Governance</i>	e-SAMBAT (Saluran Aspirasi Masyarakat Berbasis TI)
	<i>Smart Governance</i>	E-SPTPD
	<i>Smart Governance</i>	E-Survei IKM Terintegrasi
	<i>Smart Governance</i>	<i>Go Go to School (GOvernment GOes TO SCHOOL)</i>
	<i>Smart Governance</i>	Integrasi Sistem Informasi Desa dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
	<i>Smart Governance</i>	Internet Sentuh Padukuhan
	<i>Smart Governance</i>	Jalu Fitik (Jalur Utama <i>Fiber Optic</i>)
	<i>Smart Governance</i>	<i>Jetis One Stop Service (JETIS JOSS)</i> Pelayanan Kecamatan Berbasis <i>Online</i>
	<i>Smart Governance</i>	JETRUDAL (Jetis Rumah Data Lengkap)
	<i>Smart Governance</i>	KAPERU (KK Baru untuk Pengantin Baru)
	<i>Smart Governance</i>	KASINAWA (Aplikasi Rusunawa) Pembayaran E-Retribusi Rusunawa
	<i>Smart Governance</i>	LANTIP (Layanan Terpadu Investasi dan Perijinan)
	<i>Smart Governance</i>	LAPAK BANTUL
	<i>Smart Governance</i>	Leontin Mas (Legalisir <i>Online</i> Mudah Akurat Sempel)

Projotamansari	Dimensi <i>Smart City</i>	Inovasi <i>Smart City</i>
Profesional	<i>Smart Governance</i>	MOROLEGA (Mobil Operasional Layanan Administrasi Kependudukan Efektif Sekaligus Akurat)
	<i>Smart Governance</i>	PAGODA (Perekaman KTPeL Plus Test Golongan Darah)
	<i>Smart Governance</i>	Pembayaran Tagihan PDAM Secara <i>Online</i>
	<i>Smart Governance</i>	Pendaftaran ORMAS <i>online</i> aplikasi Si OLA (dr pusat)
	<i>Smart Governance</i>	Pengelolaan media dan data desa
	<i>Smart Governance</i>	Portal Geospasial/Geoportal
	<i>Smart Governance</i>	Portal Satu Data
	<i>Smart Governance</i>	Robot Uji Kolong Perhubungan Bantul - ROJIKO HUBBA
	<i>Smart Governance</i>	SAPA ASN (Aplikasi Pelayanan Terpadu Aparatur Sipil Negara)
	<i>Smart Governance</i>	SEMAKIN (Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan)
	<i>Smart Governance</i>	SIGAP (Sistem Informasi Geografi Pertanahan)
	<i>Smart Governance</i>	SIKAPU (Sistem Informasi Kearsipan DPUPKP)
	<i>Smart Governance</i>	SIMDAN
	<i>Smart Governance</i>	SIMPONI (Sistem Informasi Pendidikan dan Olahraga Terkini)
	<i>Smart Governance</i>	SIPENTOL
	<i>Smart Governance</i>	SIPESO
	<i>Smart Governance</i>	SISARI (Validasi Selasa Sehari)
	<i>Smart Governance</i>	Surban (Surat Bantul)

Projotamansari	Dimensi <i>Smart City</i>	Inovasi <i>Smart City</i>
	<i>Smart Governance</i>	Sistem Identifikasi Pengadaan (SIMDAN)
	<i>Smart Society</i>	Aplikasi SIAP KESOS
	<i>Smart Society</i>	Lapor Bantul
	<i>Smart Society</i>	Pembuatan Sistem Informasi Pengurangan Angka Kemiskinan (SIPENGKUH)
	<i>Smart Society</i>	<i>Directory</i> Kebudayaan
Sehat	<i>Smart Living</i>	DGS Layanan Kesehatan
	<i>Smart Living</i>	Gelimas Jiwo
	<i>Smart Living</i>	Gropyok TBC
	<i>Smart Living</i>	Kinanthi (Kirim obat tanpa antri)
	<i>Smart Living</i>	KUDA (Kendaraan Untuk Daurat Warga)
	<i>Smart Living</i>	PAKDE BLANGKON (Penyuluhan Kesehatan Dengan <i>Barcode</i> Langkah Online)
	<i>Smart Living</i>	Panggung Tanggap COVID-19
	<i>Smart Living</i>	PASBATIK (Pasukan Anak Sekolah Pembasmi Jentik)
	<i>Smart Living</i>	Pembukaan Rumah sakit lapangan khusus COVID-19 untuk ODP dan PDP (gejala ringan & sedang)
	<i>Smart Living</i>	Perawat Desa
	<i>Smart Living</i>	Rekam Medik Elektronik
	<i>Smart Living</i>	Satgas Pramurukti Wredha
	<i>Smart Living</i>	SIJAWARA JOS (Pasien Jiwa Sehat Sejahtera Jenius Olah Sampah)
	<i>Smart Living</i>	SIM-ELOG (Sistem Informasi Manajemen E-Logistik)
	<i>Smart Living</i>	Sistem Informasi KLB
	<i>Smart Living</i>	Sistem Pendaftaran Pasien Anjungan Pendaftaran Mandiri (APM)
	<i>Smart Living</i>	Srikandi (Sistem Registrasi Lan Informasi Kanthi Daftar Mandiri)
	<i>Smart Living</i>	Survei konsumsi rumah tangga
	<i>Smart Living</i>	WA-Tantri (Whatsapp Tanpa Antri)

Projotamansari	Dimensi <i>Smart City</i>	Inovasi <i>Smart City</i>
	<i>Smart Living</i>	SEROJA (Sehat Ekonomi Meningkatkan KaRo Jamu)
Tertib	<i>Smart Economy</i>	AWAS DAGADU (Pengawasan Perdagangan Terpadu)
	<i>Smart Economy</i>	PEGANG KAKI BESAN (Penataan PKL Berbasis Kawasan)
	<i>Smart Governance</i>	e-Audit
	<i>Smart Governance</i>	Jaring Dokumentasi
	<i>Smart Society</i>	Aplikasi PASEBAN

Sumber: Hasil analisis, 2021

BAB 07

PENUTUP.

BAB VII

PENUTUP

Dokumen Masterplan *Smart City* Kabupaten Bantul sebagai pedoman dalam implementasi *Smart City* Kabupaten Bantul berisikan gambaran umum, arah pembangunan *Smart City*, strategi pembangunan *Smart City*, rencana aksi *Smart City*, dan peta jalan pembangunan *Smart City*. Adapun strategi dan peta jalan disusun berdasarkan enam dimensi *Smart City*, yaitu: *Smart Governance*, *Smart Branding*, *Smart Economy*, *Smart Living*, *Smart Society* dan *Smart Environment*. Penyusunan Dokumen Masterplan *Smart City* tidak terlepas dari dokumen pembangunan baik RPJPD, RPJMD, dan SNI 37122:2019.

Hasil analisis potensi dan permasalahan Kabupaten Bantul menghasilkan analisis rekomendasi implementasi *Smart City* Kabupaten Bantul dalam inisiatif untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang dituangkan dalam bentuk peta jalan (*roadmap*) *Smart City* Kabupaten Bantul sampai dengan Tahun 2023. Peta jalan disusun secara rinci sebagai panduan yang holistik bagi Pemerintah Kabupaten Bantul untuk melakukan implementasi *Smart City*. Namun demikian, pelaksanaan program kegiatan pada Dokumen Masterplan *Smart City* masih sangat dimungkinkan untuk terjadi perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan. Lebih lanjut, implementasi *Smart City* Kabupaten Bantul membutuhkan partisipasi, sinergitas, dan kerjasama seluruh *stakeholder* terkait dalam mencapai visi dan misi *Smart City* Kabupaten Bantul.

REFERENSI

- Bantulpedia. (2022). Bantulpedia sudah tersedia untuk Smartphone anda. <https://bantulpedia.bantulkab.go.id/> diakses tanggal 07 Maret 2022 pukul 23.00 WIB.
- Computers Tech News. (2022). *Global Internet Of Thingsmarket To Be Worth \$1,128.4 Billion In 2017*. <https://eetechinfo.com/global-internet-of-thingsmarket-to-be-worth-1128-4-billion-in-2017/> diakses tanggal 07 Maret 2022 pukul 23.15 WIB.
- Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul. (2022). *Sunday Morning Stadion Sultan Agung Bantul*. <https://dikpora.bantulkab.go.id/galeri/img/123-sunday-morning-stadion-sultan-agung-bantul> diakses tanggal 07 Maret 2022 pukul 23.23 WIB.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2019). *Menuju 100 Smart City, Para ASN Latihan Melayani Secara Digital*. https://kominfo.go.id/content/detail/23072/menuju-100-smart-city-para-asn-latihan-melayani-secara-digital/0/sorotan_media diakses tanggal 07 Maret 2022 pukul 23.35 WIB.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2021). *Buku Panduan Penyusunan Masterplan Smart City 2021 Gerakan Menuju Smart City*. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2021). *SNI ISO 37122:2019 tentang Indikator untuk Kota Cerdas*. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025.



**PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL**